



LAPORAN PENILAIAN RESIKO

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Tahun Ajaran 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian mengacu pada lima unsur pengendalian intern dan merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur operasional dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian, pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Informasi untuk mempersiapkan Rencana Tindak Pengendalian diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern dengan pendekatan *Control Environment Evaluation (CEE)* dan *Control Self Assesment (CSA)* dengan memperhatikan struktur dan tata kelola Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Rencana Tindak Pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo ini.

Kepada semua pihak yang telah berperan dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Rencana Tindak Pengendalian ini dapat bermanfaat dan memiliki peran konkrit dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sekretaris Daerah,

Abdul Haris Widodo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
BAB II PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN	
A. Penetapan Konteks/Tujuan.....	3
B. Hasil Identifikasi Risiko.....	6
C. Hasil Analisis Risiko.....	35
D. Pengendalian yang Sudah dilakukan dan yang Masih Dibutuhkan..	48
BAB III RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	48
BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
A. Pemantauan Berkelanjutan.....	50
B. Evaluasi Terpisah.....	53
C. Pelaksanaan Tindak Lanjut.....	53
BAB VI PENUTUP	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah :

- a. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan;
- f. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Sekretariat Daerah. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dan realisasinya diharapkan terlaksana dalam tahun 202

BAB III
PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks /Tujuan

Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaiannya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap program/kegiatan, risiko pada setiap program/kegiatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Pimpinan OPD.

Penetapan konteks di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:

1. Penetapan konteks risiko strategis OPD

Penetapan konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Adapun penetapan konteks risiko strategis sebagai berikut:

Tabel 3.1. Penetapan Konteks Risiko Strategis Sekretariat Daerah

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda Tahun Penilaian Periode yang dinilai Urusan Pemerintahan an OPD yang Dinilai	: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah : 2026 : Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029 : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	
Sumber Data	Renstra Sekretariat Daerah	
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	
Sasaran Strategis	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
	2 Meningkatkan Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	3 Meningkatkan Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah	
IKU Renstra OPD	IKU	2026
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76
	2 Indeks Reformasi Hukum	85,7

	.	
	3	Indeks Tata Kelola Pengadaan
		79
Program	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	3	Program Perekonomian dan Pembangunan
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
	1 Sasaran Strategis	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
	IKU Strategis	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2 Sasaran Strategis	: Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	IKU Strategis	: Indeks Reformasi Hukum
	Program	: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	3 Sasaran Strategis	: Meningkatnya Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah
	IKU Strategis	: Indeks Tata Kelola Pengadaan
Program	: Program Perekonomian dan Pembangunan	

2. Penetapan konteks risiko operasional OPD

Penetapan konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA-SKPD. Adapun penetapan konteks risiko strategis Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Penetapan Konteks Risiko Operasional Sekretariat Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025 - 2029
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai	: Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Sumber Data	Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
Program Sekretariat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	3. Program Perekonomian dan Pembangunan
Keluaran/ Hasil Kegiatan	A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Kegiatan:
	1 Penataan organisasi
	2 Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan
	3 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
10	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
11	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
Keluaran/ Hasil Kegiatan:		
1	Cakupan Pelaksanaan Penataan Organisasi	100%
2	Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Administrasi Pimpinan	100%
3	Tingkat Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
4	Tingkat Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
5	Tingkat Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
6	Tingkat Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
7	Tingkat Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
8	Tingkat Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
9	Tingkat Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
10	Tingkat Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%
11	Tingkat Capaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah	100%
B. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
Kegiatan:		
1	Administrasi Tata Pemerintahan	
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
Keluaran/ Hasil Kegiatan:		
1	Cakupan Pelaksanaan Tata Administrasi Pemerintahan	100%
2	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%
3	Cakupan Penyusunan Produk dan Pelayanan Hukum	100%
4	Cakupan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100%
C. Program Perekonomian dan Pembangunan		
Kegiatan:		
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
3	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
4	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
Keluaran/ Hasil Kegiatan:		
1	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang Dimplemaentasikan	100%
2	Prosentase Pemantauan Kebijakan Kebijakan SDA yang Dimplemaentasikan	100%

	3	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%
	4	Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		Sda.	

B. Hasil Identifikasi Risiko

Dalam rangka melakukan proses pengendalian, dibutuhkan identifikasi atas berbagai ancaman atau risiko yang mengancam keberhasilan/kelancaran pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan termasuk diantaranya risiko yang mengancam keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi. Dengan teridentifikasinya seluruh risiko, maka antisipasi pengendalian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Identifikasi risiko dilakukan berjenjang mulai dari risiko strategis Sekretariat Daerah yang diturunkan dari IKU pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah maupun risiko operasional pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Setiap level risiko tersebut diuraikan baik dari segi penyebab terjadinya risiko hingga dampak yang diakibatkan.

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut Risiko (uraian Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Identifikasi risiko di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang meliputi identifikasi risiko strategis dan operasional tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Identifikasi Risiko Strategis Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan									
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi								
1	Sasaran:									
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terjadi ketidaktepatan dukungan administrasi umum dalam pelaksanaan akuntabilitas tugas pimpinan daerah.	RSO.26.3 3.02.01	Asisten Administrasi Umum	- Masih kurangnya kemampuan dan profesionalisme aparatur. - Belum optimalnya komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait informasi pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah.	Internal	C	Pelaksanaan tugas pimpinan daerah tidak berjalan efektif, koordinasi lintas perangkat daerah terganggu, dan kinerja pelayanan administrasi pemerintahan menurun.	- Sekretariat Daerah, - Perangkat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah								
		Nilai IKM Perangkat Daerah								
		Nilai PPID Perangkat Daerah								
2	Sasaran:									
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan	Indeks Reformasi Hukum	Terjadi keterlambatan dan penurunan kualitas penyusunan produk hukum,	RSO.26.3 3.02.02	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia kebutuhan penyusunan produk hukum yang berkualitas	Internal	C	Kebijakan daerah tidak terlaksana secara efektif, pelayanan	- Sekretariat Daerah, - Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Rakyat		penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.			dan pelayanan hukum yang optimal serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses digitalisasi dokumen hukum dan manajemen data hukum - Belum optimalnya tindak lanjut Perangkat Daerah dalam sinergi MOU/PKS - Belum optimalnya kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat - Masih kurangnya akurasi data dan kompetensi pengampu dari Perangkat Daerah dalam rangka menunjang pelaporan LPPD.			kepada masyarakat terganggu, serta capaian kinerja pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tidak tercapai sesuai target.	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai EPPD								
		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
		Persentase Produk Hukum yang dihasilkan								
3	Sasaran:									
	Meningkatnya Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Terjadi keterlambatan penyelesaian Program dan Kegiatan	RSO.26.3 3.02.03	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	- Pelaporan monitoring dan evaluasi kegiatan Perangkat Daerah belum tepat waktu, mutu, dan sasaran.- Kurangnya SDM sesuai kualifikasi dan kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan	Internal	C	Capaian target pembangunan daerah tertunda, program prioritas tidak terlaksana sesuai jadwal, dan	- Sekretariat Daerah, - Perangkat Daerah
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan	Perekonomian dan Pembangunan serta keterlambatan dan ketidaktepatan							

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Perekonomian dan SDA	pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.			jasa- Koordinasi kebijakan perekonomian dalam rangka meningkatkan kualitas BUMD, BLUD, dan OPD terkait masih rendah			kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja pembangunan menurun.	
		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan								
		Tingkat Kematangan UKPBJ								

Tabel 3.4 Identifikasi Risiko Operasional

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
1 Kegiatan Penataan organisasi											
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pelaksanaan	Terjadinya tumpang tindih kewenangan dan tugas fungsi sehingga organisasi perangkat daerah kurang efektif	ROO.26.33.03.01	Kepala Bagian Organisasi	Perangkat Daerah kurang memahami tugas dan fungsi	Internal	C	Terdapat urusan pemerintahan yang tidak tertangani	Seluruh Perangkat Daerah
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pelaksanaan	Penyusunan dokumen ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak tepat waktu	ROO.26.33.03.02	Kepala Bagian Organisasi	Penyusunan peta proses bisnis membutuhkan koordinasi lintas OPD dan membutuhkan waktu yang lama	Eksternal	C	Proses Bisnis Kabupaten Sukoharjo dan Perangkat Daerah tidak segera tersusun	Seluruh Perangkat Daerah
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pelaporan	Pengisian realisasi rencana aksi RB tidak tepat waktu	ROO.26.33.03.03	Kepala Bagian Organisasi	Keterlambatan OPD dalam menyampaikan data dan informasi	Internal	C	Pelaporan pada portal RB tidak menggunakan data terkini sehingga dapat mempengaruhi indeks Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pelaksanaan	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak selesai tepat waktu.	ROO.26.33.03.04	Kepala Bagian Organisasi	Keterlambatan Perangkat Daerah dalam mengumpulkan laporan SKM Perangkat Daerah.	Eksternal	C	Laporan tidak terselesaikan tepat waktu dan pengumpulan laporan SKM kepada Kementerian PAN RB melebihi batas waktu yang ditentukan	Seluruh Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Pelaporan	LKjIP Kabupaten tidak tepat waktu.	ROO.26.33.03.05	Kepala Bagian Organisasi	Keterlambatan OPD dalam menyampaikan data dan informasi.	Internal	C	Dokumen tidak terselesaikan tepat waktu dan dapat mempengaruhi nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Seluruh Perangkat Daerah
2	Kegiatan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan										
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Pelaksanaan	Fasilitasi keprotokolan tidak berjalan secara optimal.	ROO.26.33.03.06	Kepala Bagian Prokopim	Kurangnya koordinasi antara penyelenggara acara dengan protokoler, kesiapan panitia dalam menyelenggarakan kegiatan, dan perubahan acara yang mendadak.	Internal	C	Acara tidak berjalan tertib dan sesuai tata protokol dan Menurunnya citra profesionalisme Pemerintah Daerah.	- Kepala Daerah - Seluruh Perangkat Daerah - Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan	Fasilitasi komunikasi pimpinan/branding media massa kurang optimal.	ROO.26.33.03.07	Kepala Bagian Prokopim	SDM kurang memadai; alat/sarpras pendukung kurang memadai.	Internal	C	Kinerja dan Publikasi belum optimal	Kepala Daerah
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pelaksanaan	Kegiatan pimpinan tidak terdokumentasi dan mengalami keterlambatan publikasi.	ROO.26.33.03.08	Kepala Bagian Prokopim	Sarpras dokumentasi dan publikasi tidak memadai.	Internal	C	Kepercayaan masyarakat menurun	Kepala Daerah
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	ROO.26.33.03.09	Kepala Bagian Umum	- Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan antar unit belum optimal. - Data dan informasi pendukung perencanaan tidak tersedia tepat waktu. - Proses konsolidasi dan reviu dokumen perencanaan belum efektif.	Internal	C	- Dokumen perencanaan Perangkat Daerah tidak tersusun tepat waktu atau kurang berkualitas. - Pelaksanaan program dan kegiatan tidak memiliki dasar perencanaan yang memadai. - Pencapaian sasaran Perangkat	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
										Daerah tidak optimal.	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	ROO.26.33.03.10	Kepala Bagian Umum	- Koordinasi penyusunan RKA-SKPD belum berjalan efektif. - Sinkronisasi RKA-SKPD dengan dokumen perencanaan belum optimal. - Proses verifikasi dan pembahasan RKA-SKPD tidak tepat waktu.	Internal	C	- Dokumen RKA-SKPD tidak sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang ditetapkan. - Proses penetapan anggaran Perangkat Daerah terhambat. - Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terganggu.	Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ROO.26.33.03.11	Kepala Bagian Umum	- Penyesuaian perubahan kebijakan dan prioritas belum terkoordinasi dengan baik. - Data perubahan kebutuhan anggaran tidak tersedia tepat waktu. - Proses pembahasan	Internal	C	- Dokumen Perubahan RKA-SKPD tidak tersusun tepat waktu atau kurang akurat. - Penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
							dan penelaahan perubahan RKA-SKPD belum efektif.			terhambat. - Kinerja Perangkat Daerah tidak optimal.	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan penetapan Dokumen DPA-SKPD.	ROO.26.33.03.12	Kepala Bagian Umum	- Proses finalisasi dan verifikasi dokumen belum berjalan optimal. - Koordinasi antar unit terkait penetapan DPA-SKPD kurang efektif. - Penyampaian dokumen pendukung tidak tepat waktu.	Internal	C	- Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah tertunda. - Penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. - Kinerja Perangkat Daerah terganggu.	Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan penetapan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	ROO.26.33.03.13	Kepala Bagian Umum	- Proses penyesuaian perubahan anggaran belum terkoordinasi dengan baik. - Keterlambatan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. - Proses verifikasi dan penetapan perubahan DPA-SKPD belum efektif.	Internal	C	- Pelaksanaan perubahan program dan kegiatan tidak dapat segera dilaksanakan. - Penyesuaian penggunaan anggaran Perangkat Daerah terhambat.	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
										- Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan menurun.	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan pelaksanaan atau ketidaktepatan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	ROO.26.33.03.14	Kepala Bagian Umum	Pengumpulan dan pengolahan data kinerja belum optimal. - Koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja antar unit kurang efektif. - Mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja belum berjalan baik.	Internal	C	- Hasil evaluasi kinerja tidak tersedia tepat waktu atau kurang akurat - Pengambilan keputusan perbaikan kinerja menjadi terhambat. - Peningkatan kinerja Perangkat Daerah tidak optimal.	Perangkat Daerah
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidakesuaian pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	ROO.26.33.03.20	Kepala Bagian Umum	- Perencanaan kebutuhan pakaian dinas dan atribut belum disusun secara akurat. - Koordinasi pelaksanaan pengadaan belum berjalan optimal. - Proses verifikasi	Internal	C	- Pakaian dinas dan atribut tidak tersedia tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan. - Pelaksanaan tugas kedinasan ASN tidak didukung secara optimal.	ASN Sekretariat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
							spesifikasi dan jumlah kebutuhan belum efektif.			- Ketertiban dan keseragaman aparatur dalam pelaksanaan tugas terganggu.	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pengumpulan	Terjadinya ketidaktepatan atau keterlambatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.	ROO.26.33.03.21	Kepala Bagian Umum	- Pengumpulan dan pemutakhiran data kepegawaian belum berjalan tertib. - Sistem pengelolaan data kepegawaian belum dimanfaatkan secara optimal. - Koordinasi antar unit dalam penyampaian data kepegawaian belum efektif.	Internal	C	- Data dan dokumen administrasi kepegawaian tidak akurat atau tidak mutakhir. - Pelayanan administrasi kepegawaian kepada ASN terganggu. - Pengambilan keputusan kepegawaian menjadi kurang tepat.	Perangkat Daerah
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaporan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai.	ROO.26.33.03.22	Kepala Bagian Umum	- Perencanaan dan penjadwalan monitoring serta evaluasi kinerja belum optimal. - Data kinerja pegawai tidak tersedia secara lengkap dan tepat waktu. - Mekanisme penilaian	Internal	C	- Hasil penilaian kinerja pegawai tidak tersedia tepat waktu atau kurang akurat. - Upaya pembinaan dan peningkatan kinerja pegawai terhambat.	- ASN Sekretariat Daerah - Pimpinan unit kerja

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
							kinerja belum diterapkan secara konsisten.			- Kinerja organisasi Perangkat Daerah tidak optimal.	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan	Tidak terpenuhinya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	ROO.26.33.03.23	Kepala Bagian Umum	Tidak tersampainya informasi undangan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Internal	C	Tidak meningkatnya kompetensi ASN Sekretariat Daerah	ASN Sekretariat Daerah
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan	Belum optimalnya sasaran sosialisasi kepada masyarakat terutama penjual dan pembeli Rokok Illegal (tidak berpita Cukai resmi)	ROO.26.33.03.24	Kepala Bagian Umum	Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan minimnya informasi untuk membeli rokok yang berpita Cukai resmi	Eksternal	C	Tidak Optimalnya penggunaan Rokok di masyarakat secara Legal	- Perangkat Daerah - Masyarakat
5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian spesifikasi,	ROO.26.33.03.33	Kepala Bagian Umum	- Penetapan spesifikasi teknis kendaraan dinas belum dirumuskan	Internal	C	- Kendaraan dinas tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		atau ketidaktepatan pengadaan kendaraan dinas.			secara jelas. - Proses pengadaan dan verifikasi hasil pengadaan belum berjalan efektif. - Koordinasi antara pengguna dan pengelola pengadaan kurang optimal.			operasional. - Pelaksanaan tugas kedinasan menjadi kurang efektif.	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan peralatan dan mesin lainnya.	ROO.26.33.03.34	Kepala Bagian Umum	- Perencanaan kebutuhan peralatan dan mesin belum akurat. - Proses pengadaan dan penerimaan barang belum tertib.	Internal	C	- Peralatan dan mesin tidak mendukung kelancaran operasional Perangkat Daerah. - Efektivitas pelaksanaan tugas teknis menurun.	Perangkat Daerah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang disediakan	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.35	Kepala Bagian Umum	- Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana belum disusun secara komprehensif. - Koordinasi pelaksanaan pengadaan belum optimal. - Proses pengawasan pelaksanaan	Internal	C	- Sarana dan prasarana gedung tidak mendukung aktivitas perkantoran secara optimal. - Kenyamanan dan kelancaran kerja terganggu.	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
							pengadaan kurang efektif.				
	Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang disediakan	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidaktepatan pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.36	Kepala Bagian Umum	- Penetapan kebutuhan dan spesifikasi gedung belum tepat. - Proses pengadaan dan penetapan hasil pengadaan memerlukan waktu lebih lama.	Internal	C	- Pemanfaatan gedung kantor tidak sesuai rencana. - Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terganggu.	Perangkat Daerah
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Informasi Kepada SKPD dan Pemerintah Atasan	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidaktepatan, atau gangguan penyediaan jasa surat menyurat.	ROO.26.33.03.37	Kepala Bagian Umum	- Pengelolaan jasa surat menyurat belum tertib. - Koordinasi penyediaan layanan belum efektif.	Internal	C	- Penyampaian dokumen dan informasi resmi menjadi terhambat. - Proses administrasi dan pengambilan keputusan terganggu.	Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan	Pelaksanaan	Terjadinya gangguan, keterlambatan, atau ketidakterpenuhan penyediaan	ROO.26.33.03.38	Kepala Bagian Umum	- Pengelolaan dan pengawasan penyediaan layanan utilitas belum optimal. - Ketergantungan pada pihak penyedia jasa eksternal.	Internal	C	- Aktivitas perkantoran dan layanan pemerintahan terganggu. - Pelaksanaan tugas ASN tidak	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Internet		jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.						berjalan normal.	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	ROO.26.33.03.39	Kepala Bagian Umum	- Perencanaan kebutuhan perlengkapan kantor belum akurat. - Proses penyediaan dan distribusi belum berjalan tertib.	Internal	C	- Ketersediaan perlengkapan kerja tidak mendukung aktivitas kantor. - Produktivitas kerja ASN menurun.	Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidakterlaksanaan, atau ketidakefektifan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.	ROO.26.33.03.40	Kepala Bagian Umum	- Pengelolaan jasa pelayanan umum belum terkoordinasi dengan baik. - Pengawasan pelaksanaan jasa belum optimal.	Internal	C	- Kenyamanan dan kelancaran operasional kantor terganggu. - Lingkungan kerja menjadi kurang kondusif.	Perangkat Daerah
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mobil Jabatan	Pelaksanaan	Kendaraan dinas jabatan tidak terpelihara	ROO.26.33.03.41	Kepala Bagian Umum	Usia kendaraan operasional dinas banyak sudah diatas 10 tahun	Internal	C	Kendaraan dinas jabatan rusak	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Pelaksanaan	Kendaraan dinas operasional atau lapangan rusak parah	ROO.26.33.03.42	Kepala Bagian Umum	Belum tersusun jadwal pemeliharaan berdasarkan skala prioritas	Internal	C	Mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan membengkaknya biaya perawatan kendaraan dinas	Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan	Peralatan Kantor banyak yang rusak	ROO.26.33.03.43	Kepala Bagian Umum	Belum tersusun jadwal pemeliharaan berdasarkan skala prioritas	Internal	C	Menghambat kelancaraan dalam bekerja	Perangkat Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidakefektifan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.44	Kepala Bagian Umum	Belum tersusun jadwal pemeliharaan berdasarkan skala prioritas	Internal	C	Menghambat kelancaraan dalam bekerja	Perangkat Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan	Belum terakomodirnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor secara memadai	ROO.26.33.03.45	Kepala Bagian Umum	Banyaknya sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang layak dan besarnya biaya pemeliharaan gedung bertingkat	Internal	C	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
8 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.33.03.46	Kepala Bagian Umum	- Proses administrasi pembayaran belum berjalan tepat waktu. - Verifikasi dokumen pembayaran belum tertib.	Internal	C	- Pembayaran hak keuangan pimpinan tidak dilakukan sesuai jadwal atau ketentuan. - Tertib administrasi keuangan terganggu.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidakterlaksanaan pelaksanaan medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.33.03.47	Kepala Bagian Umum	- Perencanaan dan penjadwalan medical check up belum optimal. - Koordinasi pelaksanaan dengan pihak terkait belum efektif.	Internal	C	- Medical check up tidak dilaksanakan tepat waktu atau tidak terlaksana. - Pemantauan kondisi kesehatan pimpinan tidak optimal.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
	Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidakesuaian penyediaan	ROO.26.33.03.48	Kepala Bagian Umum	- Perencanaan kebutuhan pakaian dinas dan atribut belum akurat. - Proses penyediaan	Internal	C	- Pakaian dinas dan atribut tidak tersedia tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.			dan verifikasi spesifikasi belum efektif.			- Dukungan perlengkapan kedinasan pimpinan tidak optimal.	
9 Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah											
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pelaksanaan	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tidak sesuai	ROO.26.33.03.49	Kepala Bagian Umum	Kenaikan harga barang kebutuhan pokok	Eksternal	UC	Kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tidak optimal	Kepala Daerah
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tidak sesuai	ROO.26.33.03.50	Kepala Bagian Umum	Kenaikan harga barang kebutuhan pokok	Eksternal	UC	Kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tidak optimal	Wakil Kepala Daerah
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pelaksanaan	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah tidak sesuai	ROO.26.33.03.51	Kepala Bagian Umum	Kenaikan harga barang kebutuhan pokok	Eksternal	UC	Kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah tidak optimal	Sekretaris Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
II Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat											
1 Kegiatan Administrasi tata pemerintahan											
	Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah dokumen penataan administrasi pemerintahan	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penataan administrasi pemerintahan.	ROO.26.33.03.52	Kepala Bagian Pemerintahan	Peraturan perundang-undangan yang berubah membutuhkan penyesuaian pelaksanaan di daerah	Eksternal	UC	Setiap peraturan pusat yang terbit membutuhkan peraturan pelaksana yang dalam penyusunannya membutuhkan waktu, sarana dan prasarana dan kompetensi SDM untuk memahami	- Perangkat Daerah - Masyarakat - Pihak ketiga
	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan pengelolaan administrasi kewilayahan.	ROO.26.33.03.53	Kepala Bagian Pemerintahan	- Data dan informasi administrasi kewilayahan belum terhimpun dan dimutakhirkan secara konsisten. - Koordinasi antara Perangkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa belum berjalan optimal. - Prosedur pengelolaan administrasi	Eksternal	C	- Informasi administrasi kewilayahan tidak akurat atau tidak tersedia tepat waktu. - Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah menjadi kurang efektif. - Pengambilan keputusan dan penetapan	- Perangkat Daerah. - Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa. - Pimpinan Daerah.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
							kewilayahan belum diterapkan secara tertib dan seragam.			kebijakan kewilayahan menjadi kurang tepat.	
	Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Pelaksanaan	Terjadinya ketidakefektifan atau keterlambatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.	ROO.26.33.03.54	Kepala Bagian Pemerintahan	OPD terlambat dalam penyampaian data dukung	Eksternal	C	Kinerja ASN kurang	Perangkat Daerah
2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat											
	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidakterlaksanaan, atau ketidakefektifan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	ROO.26.33.03.55	Kepala Bagian Kesra	- Penetapan Kuota Jamaah Haji yang dinamis/berubah setiap tahun - Keterbatasan Sumber daya manusia di bidang keagamaan - Kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait	Internal, Eksternal	C	- Pemberian fasilitas kepada jamaah haji yang kurang optimal - Fasilitasi Kegiatan Keagamaan yang kurang Optimal	- Perangkat Daerah, - Masyarakat
	Evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi dan	ROO.26.33.03.56	Kepala Bagian Kesra	- Keterbatasan Sumber Daya - Monitoring dan Evaluasi yang belum berjalan optimal	Internal, Eksternal	C	- Meningkatnya risiko penyimpangan penggunaan bantuan yang	- Perangkat Daerah, - Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		terkait kesejahteraan sosial		pelaksanaan kebijakan serta pengukuran capaian kinerja kesejahteraan sosial.			- Penyebaran Informasi kepada masyarakat yang kurang optimal			mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran - Program Kegiatan tidak berjalan optimal	
	Evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan serta pengukuran capaian kinerja kesejahteraan masyarakat.	ROO.26.33.03.57	Kepala Bagian Kesra	Sosialisasi dan Informasi Terkait Bantuan Kegiatan bagi Kelompok Masyarakat yang kurang optimal	Internal, Eksternal	C	Bantuan Kegiatan yang diberikan tidak merata ke seluruh kelompok masyarakat	- Perangkat Daerah, - Masyarakat
3 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											
	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.	ROO.26.33.03.58	Kepala Bagian Hukum	- Keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang kompeten. - Koordinasi yang kurang efektif dengan instansi terkait.	Internal, Eksternal	C	- Proses legislasi dan regulasi menjadi tertunda. - Kredibilitas pemerintah daerah dapat menurun.	Seluruh Perangkat Daerah
	Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau	ROO.26.33.03.59	Kepala Bagian Hukum	- Kompleksitas kasus hukum yang melibatkan banyak	Internal, Eksternal	UC	- Proses penyelesaian kasus menjadi	- Perangkat Daerah - Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		fasilitas bantuan hukum		ketidakefektifan fasilitasi bantuan hukum.			pihak. - Keterbatasan akses terhadap dokumen pendukung			terhambat. - Risiko keputusan hukum yang kurang maksimal.	atau pihak yang dilayani
	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan, keterlambatan, atau ketidakterpaduan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum.	ROO.26.33.03.60	Kepala Bagian Hukum	- Infrastruktur TI yang tidak memadai (jaringan lambat, perangkat tua). - Ketergantungan pada pihak ketiga tanpa kontrol optimal.	Internal, Eksternal	C	- Proses digitalisasi dokumen terhambat. - Potensi kesalahan atau kehilangan data yang sensitif.	Seluruh Perangkat Daerah
4 Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah											
	Fasilitasi kerja sama dalam negeri	jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidaktepatan, atau ketidakefektifan fasilitasi kerja sama dalam negeri.	ROO.26.33.03.61	Kepala Bagian Pemerintahan	Keterlambatan dalam penyampaian data dukung	Eksternal	C	Kinerja ASN kurang	Perangkat Daerah
	Evaluasi pelaksanaan kerja sama	jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	Pelaporan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan	ROO.26.33.03.62	Kepala Bagian Pemerintahan	Aturan kerjasama belum dipahami para pihak yang ingin melaksanakannya	Eksternal	C	Para Pihak belum mengetahui prosedur dan sebagainya dan	- Perangkat Daerah, - Masyarakat, - Pihak ketiga

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				evaluasi pelaksanaan kerja sama.			kerjasama			hanya ingin kerjasama untuk memenuhi syarat formil saja	
III Program Perekonomian dan Pembangunan											
1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.	ROO.26.33.03.63	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Belum dipahaminya regulasi terkait penatausahaan keuangan bagi BUMD dan BLUD di Kabupaten	Internal, Eksternal	C	Regulasi baru terkait penatausahaan keuangan belum dipakai	- Perangkat Daerah pengampu urusan perekonomian - BUMD dan BLUD
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan pengendalian dan distribusi perekonomian.	ROO.26.33.03.64	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	- Koordinasi pengendalian distribusi antar Perangkat Daerah belum berjalan optimal. - Data dan informasi distribusi perekonomian belum akurat atau tidak mutakhir.	Internal, Eksternal	C	- Pengendalian dan distribusi perekonomian tidak berjalan sesuai kebijakan yang ditetapkan. - Ketidakseimbangan distribusi dapat terjadi pada wilayah	- Perangkat Daerah pengampu urusan perekonomian, - Pelaku usaha dan masyarakat.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
										atau sektor tertentu. - Kinerja perekonomian daerah menjadi kurang stabil.	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.	ROO.26.33.03.65	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	- Data pelaku ekonomi mikro kecil belum terhimpun secara lengkap. - Koordinasi perencanaan dan pengawasan antar unit terkait belum optimal. - Mekanisme pengawasan kegiatan ekonomi mikro kecil belum berjalan efektif.	Internal, Eksternal	C	- Program pembinaan dan pengembangan ekonomi mikro kecil tidak tepat sasaran. - Pengawasan kegiatan ekonomi mikro kecil tidak efektif. - Dampak kebijakan terhadap penguatan ekonomi mikro kecil menjadi terbatas	- Pelaku usaha mikro dan kecil, - Perangkat Daerah pembina ekonomi mikro kecil.
2 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam											
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi,	ROO.26.33.03.66	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	- Koordinasi lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah belum berjalan efektif. - Sinkronisasi kebijakan antar	Internal, Eksternal	C	- Pelaksanaan kebijakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak terpadu.	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, dan perikanan			subsektor belum konsisten. - Mekanisme evaluasi kebijakan belum diterapkan secara optimal.			- Capaian kebijakan sektor-sektor tersebut tidak optimal. - Dampak kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku sektor menjadi terbatas.	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Pelaksanaan	Terjadinya , ketidaktepatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup.	ROO.26.33.03.67	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	- Koordinasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup belum terintegrasi dengan baik. - Data dan informasi evaluasi kebijakan belum tersedia tepat waktu. - Sinkronisasi kebijakan antar Perangkat Daerah terkait belum efektif.	Internal, Eksternal	C	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Perangkat Daerah
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan, atau	ROO.26.33.03.68	Kepala Bagian Perekonomian	Belum semua PD yang punya gedung melaporkan	Internal, Eksternal	C	Data pelaporan energi se Kabupaten	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Energi dan Air	Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air.		n dan SDA	penghematan energi			Sukoharjo yang belum lengkap	
3	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan										
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan fasilitasi penyusunan program pembangunan.	ROO.26.33.03.69	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	- Pengumpulan bahan untuk perencanaan dari bagian-bagian yang tidak tepat - Koordinasi dengan bagian-bagian kurang intensif	Eksternal	C	- Penyusunan Dokumen Perencanaan yang tepat waktu tidak dapat segera terealisasi, - Pelaksanaan kegiatan tanpa perencanaan yang matang	Perangkat Daerah
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan	ROO.26.33.03.70	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	- Jadwal monitoring belum terkoordinasi dengan baik - Keterbatasan sumber	Internal	C	- Tertundanya identifikasi permasalahan di lapangan	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Program Pembangunan		pengendalian dan evaluasi program pembangunan.		n	daya (manusia dan peralatan) - Kurang koordinasi antara pelaksana, pengawas, dan stakeholder			- Meningkatnya risiko penyimpangan yang tidak terdeteksi - Tumpang tindih tugas monitoring	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pelaporan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.	ROO.26.33.03.71	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	- Berkas pelaporan Operasional Kegiatan APBD terlambat dilengkapi oleh Perangkat Daerah - Kendala teknis pada Sistem Informasi - Adanya kekurangan Bahan / data yang diberikan dari OPD lain. - Koordinasi dengan OPD lain kurang intensif	Eksternal	C	Kesalahan dalam penyusunan laporan atau dokumen Pembangunan	Perangkat Daerah
4	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Proses pengadaan barang/jasa pemerintah di OPD belum optimal	ROO.26.33.03.72	Kepala Bagian PBJ	Pelaku pengadaan di OPD belum memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan baik	Eksternal	C	Proses pengadaan barang/jasa pada perencanaan dan persiapan terhambat dan terlambat dari	Seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
										jadwal RUP	
			Pelaksanaan	Adanya Tender gagal	ROO.26.33.03.73	Kepala Bagian PBJ	Tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan atau tidak ada yang memasukkan penawaran	Eksternal	C	Tender ulang/batal	Seluruh Perangkat Daerah
			Pelaksanaan	Dokumen persiapan pengadaan tidak lengkap	ROO.26.33.03.74	Kepala Bagian PBJ	PPK kurang memahami persyaratan dokumen yang harus dilengkapi saat mengajukan tender ke Bagian PBJ	Eksternal	C	Dokumen persiapan pengadaan dikembalikan ke PPK	Seluruh Perangkat Daerah
			Pelaksanaan	Proses pemilihan penyedia melebihi waktu yang ditetapkan	ROO.26.33.03.75	Kepala Bagian PBJ	Kurang cermatnya pokja pemilihan atau pejabat pengadaan menyusun jadwal pemilihan atau kelalaian dalam melaksanakan pemilihan sesuai jadwal	Internal	C	Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai jadwal	Seluruh Perangkat Daerah
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pelaksanaan	Gangguan Layanan pengadaan secara elektronik	ROO.26.33.03.76	Kepala Bagian PBJ	Akses Internet terputus; Server bermasalah; pemeliharaan; Update Sistem.	Eksternal	C	Layanan Pengadaan Secara Elektronik tidak tersedia	Seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaksanaan	Proses verifikasi penyedia yang terhambat	ROO.26.33.03.77	Kepala Bagian PBJ	Error aplikasi saat proses pendaftaran penyedia, kesalahan input data penyedia	Eksternal	C	Penyedia masih belum bisa mengaktivasi akunnya	Seluruh Perangkat Daerah
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan, keterlambatan, atau ketidakefektifan pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.	ROO.26.33.03.78	Kepala Bagian PBJ	Regulasi/ aturan cepat berubah	Eksternal	C	Pelaksanaan proses PBJ tidak sesuai dengan aturan yang terbaru	Seluruh Perangkat Daerah

C. Hasil Analisis Risiko

Analisis risiko dinilai dari sisi kemungkinan terjadi dan dampak yang dihasilkan oleh suatu risiko. Seluruh risiko yang teridentifikasi tersebut, dilakukan analisis untuk melihat skala kemungkinan dan dampak yang dihasilkan. Penilaian skala kemungkinan diberikan dengan metode penilaian 1 sampai dengan 4. Semakin besar skala kemungkinan, maka semakin besar pula kemungkinan suatu risiko terjadi. Berikut adalah tabel penilaian skala kemungkinan menurut nilai.

Tabel 3.5. Skala Kemungkinan dan Level Risiko

Skala	Level Risiko	Kemungkinan
1	Sangat Jarang Terjadi	1. Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%) 2. Dapat terjadi < 2 dalam 1 tahun
2	Jarang Terjadi	1. Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas >20% s.d 40%) 2. Dapat terjadi > 2 s.d 5 dalam 1 tahun
3	Kadang Terjadi	1. Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas >40% s.d 60%) 2. Dapat terjadi > 5 s.d 7 kali dalam 1 tahun
4	Sering Terjadi	1. Sering terjadi (probabilitas >60% s.d 80%) 2. Dapat terjadi > 7 s.d 10 kali dalam 1 tahun
5	Hampir Pasti Terjadi	1. Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%) 2. Dapat terjadi > 10 kali dalam 1 tahun

Analisis dampak dilakukan untuk menilai skala dampak suatu risiko. Semakin besar nilai risiko maka semakin besar pula dampak yang dihasilkan oleh risiko tersebut. Seperti halnya skala kemungkinan, skala dampak juga diukur melalui nilai 1 hingga 5. Tabel 3.6 berikut menggambarkan skala dampak serta uraian dampak yang dihasilkan.

Tabel 3.6. Skala Dampak dan Uraian Risiko

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi pidana
Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian	Kegiatan	Negatif,	Pelanggaran

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
		kecil, kurang material	terhambat, kurang efisien	terdapat pemberitaan	biasa sanksi teguran
Sangat Kecil	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Pelanggaran biasa, tidak ada sanksi

Proses penilaian dan analisis risiko yang dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan melibatkan pejabat struktural dan Fungsional sebagai responden melalui metode Focus Group Discussion (FGD). Setiap responden memberikan pendapat dan penilaian terhadap seluruh risiko yang telah diidentifikasi. Masing-masing risiko dinilai skala dampak dan kemungkinan yang telah dinilai oleh responden kemudian dirata-ratakan dan menjadi nilai skala dampak/kemungkinan suatu risiko. Nilai rata-rata penilaian skala kemungkinan dan skala dampak masing-masing risiko tersebut kemudian dikalikan menjadi nilai skala risiko. Dari hasil perkalian akan di dapat risiko dengan nilai tertinggi yang kemudian akan diangkat menjadi risiko prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di tahun 2026. Tabel 3.7 menggambarkan seluruh uraian hasil analisis risiko di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 3.7 Analisis Risiko

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=d X e
I	Sasaran Strategis Sekretariat Daerah				
1	Terjadi ketidaktepatan dukungan administrasi umum dalam pelaksanaan akuntabilitas tugas pimpinan daerah.	RSO.26.33 .02.01	1	3	5
2	Terjadi keterlambatan dan penurunan kualitas penyusunan produk hukum, penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.	RSO.26.33 .02.02	1	3	5
3	Terjadi keterlambatan penyelesaian Program dan Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan serta keterlambatan dan ketidaktepatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.	RSO.26.33 .02.03	1	3	5
II	Program & Kegiatan PD				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Kegiatan Penataan organisasi				
1	Terjadinya tumpang tindih kewenangan dan tugas fungsi sehingga organisasi perangkat daerah kurang efektif	ROO.26.3 3.03.01	1	2	3
2	Penyusunan dokumen ketatalaksanaan di	ROO.26.3 3.03.02	2	1	2

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=d X e
	lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak tepat waktu				
3	Pengisian realisasi rencana aksi RB tidak tepat waktu	ROO.26.3 3.03.03	2	3	11
4	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak selesai tepat waktu.	ROO.26.3 3.03.04	1	1	1
5	LKJIP Kabupaten tidak tepat waktu.	ROO.26.3 3.03.05	1	2	3
Kegiatan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan					
6	Fasilitasi keprotokolan tidak berjalan secara optimal.	ROO.26.3 3.03.06	4	2	12
7	Fasilitasi komunikasi pimpinan/branding media massa kurang optimal.	ROO.26.3 3.03.07	3	2	10
8	Kegiatan pimpinan tidak terdokumentasi dan mengalami keterlambatan publikasi.	ROO.26.3 3.03.08	1	2	3
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
9	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	ROO.26.3 3.03.09	2	2	7
10	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	ROO.26.3 3.03.10	1	2	3
11	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ROO.26.3 3.03.11	1	2	3
12	Terjadinya keterlambatan penetapan Dokumen DPA-SKPD.	ROO.26.3 3.03.12	1	2	3
13	Terjadinya keterlambatan penetapan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	ROO.26.3 3.03.13	1	2	3
14	Terjadinya keterlambatan pelaksanaan atau ketidaktepatan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	ROO.26.3 3.03.14	2	3	11
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
15	Terjadinya keterlambatan/ tertundanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.26.3 3.03.15	1	2	3
16	Terjadinya kesalahan atau keterlambatan penatausahaan serta pengujian/verifikasi keuangan SKPD.	ROO.26.3 3.03.16	2	3	11
17	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	ROO.26.3 3.03.17	1	3	5
18	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.	ROO.26.3 3.03.18	1	2	3
19	Terjadinya ketidaktepatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.	ROO.26.3 3.03.19	1	2	3
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
20	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	ROO.26.3 3.03.20	2	2	7
21	Terjadinya ketidaktepatan atau	ROO.26.3	1	2	3

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=d X e
	keterlambatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.	3.03.21			
22	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai.	ROO.26.3 3.03.22	1	2	3
23	Tidak terpenuhinya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	ROO.26.3 3.03.23	2	2	7
24	Belum optimalnya sasaran sosialisasi kepada masyarakat terutama penjual dan pembeli Rokok Ilegal (tidak berpita Cukai resmi)	ROO.26.3 3.03.24	2	3	11
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
25	Persediaan komponen intalasi listrik kurang	ROO.26.3 3.03.25	3	3	14
26	ATK kurang tersedia	ROO.26.3 3.03.26	1	2	3
27	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan peralatan rumah tangga.	ROO.26.3 3.03.27	2	2	7
28	Kekurangan persediaan Bahan logistik kantor	ROO.26.3 3.03.28	2	2	7
29	Permintaan barang cetakan tidak sesuai dengan rencana	ROO.26.3 3.03.29	1	2	3
30	Kenaikan harga surat kabar, surat kabar/ majalah yang dibutuhkan tidak sesuai	ROO.26.3 3.03.30	1	2	3
31	Tidak optimalnya pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah	ROO.26.3 3.03.31	3	2	10
32	Terjadinya keterlambatan, ketidaklaksanaan, atau ketidakefektifan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	ROO.26.3 3.03.32	2	2	7
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
33	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau ketidaktepatan pengadaan kendaraan dinas.	ROO.26.3 3.03.33	2	2	7
34	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan peralatan dan mesin lainnya.	ROO.26.3 3.03.34	2	2	7
35	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.3 3.03.35	2	2	7
36	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidaktepatan pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.3 3.03.36	2	2	7
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
37	Terjadinya keterlambatan, ketidaktepatan, atau gangguan penyediaan jasa surat menyurat.	ROO.26.3 3.03.37	1	2	3
38	Terjadinya gangguan, keterlambatan, atau ketidakterpenuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	ROO.26.3 3.03.38	3	2	10
39	Terjadinya keterlambatan atau	ROO.26.3	1	2	3

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=d X e
	ketidaksesuaian penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	3.03.39			
40	Terjadinya keterlambatan, ketidakterlaksanaan, atau ketidakefektifan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.	ROO.26.3 3.03.40	1	2	3
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
41	Kendaraan dinas jabatan tidak terpelihara	ROO.26.3 3.03.41	3	3	14
42	Kendaraan dinas operasional atau lapangan rusak parah	ROO.26.3 3.03.42	3	3	14
43	Peralatan Kantor banyak yang rusak	ROO.26.3 3.03.43	2	3	11
44	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidakefektifan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	ROO.26.3 3.03.44	3	3	14
45	Belum terakomodirnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor secara memadai	ROO.26.3 3.03.45	3	3	14
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
46	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.3 3.03.46	1	2	3
47	Terjadinya keterlambatan atau ketidakterlaksanaan pelaksanaan medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.3 3.03.47	2	3	11
48	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.3 3.03.48	2	3	11
Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					
49	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tidak sesuai	ROO.26.3 3.03.49	1	2	3
50	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tidak sesuai	ROO.26.3 3.03.50	1	2	3
51	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah tidak sesuai	ROO.26.3 3.03.51	1	2	3
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
Kegiatan Administrasi tata pemerintahan					
52	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penataan administrasi pemerintahan.	ROO.26.3 3.03.52	3	1	4
53	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan pengelolaan administrasi kewilayahan.	ROO.26.3 3.03.53	1	3	5
54	Terjadinya ketidakefektifan atau keterlambatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.	ROO.26.3 3.03.54	2	2	7

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=d X e
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
55	Terjadinya keterlambatan, ketidakterlaksanaan, atau ketidakefektifan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	ROO.26.3 3.03.55	3	1	4
56	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan serta pengukuran capaian kinerja kesejahteraan sosial.	ROO.26.3 3.03.56	2	4	13
57	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan serta pengukuran capaian kinerja kesejahteraan masyarakat.	ROO.26.3 3.03.57	3	1	4
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					
58	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.	ROO.26.3 3.03.58	2	2	7
59	Terjadinya keterlambatan atau ketidakefektifan fasilitasi bantuan hukum.	ROO.26.3 3.03.59	1	2	3
60	Terjadinya ketidaktepatan, keterlambatan, atau ketidakterpaduan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum.	ROO.26.3 3.03.60	1	1	1
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah					
61	Terjadinya keterlambatan, ketidaktepatan, atau ketidakefektifan fasilitasi kerja sama dalam negeri.	ROO.26.3 3.03.61	2	2	7
62	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi pelaksanaan kerja sama.	ROO.26.3 3.03.62	1	2	3
Program Perekonomian dan Pembangunan					
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					
63	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.	ROO.26.3 3.03.63	2	3	11
64	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan pengendalian dan distribusi perekonomian.	ROO.26.3 3.03.64	1	3	5
65	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.	ROO.26.3 3.03.65	1	3	5
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					
66	Terjadinya ketidaktepatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, dan perikanan	ROO.26.3 3.03.66	1	3	5
67	Terjadinya , ketidaktepatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup.	ROO.26.3 3.03.67	1	3	5
68	Terjadinya ketidaktepatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air.	ROO.26.3 3.03.68	1	3	5

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=d X e
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					
69	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan fasilitasi penyusunan program pembangunan.	ROO.26.3 3.03.69	3	1	4
70	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.	ROO.26.3 3.03.70	2	3	11
71	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.	ROO.26.3 3.03.71	1	2	3
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
72	Proses pengadaan barang/jasa pemerintah di OPD belum optimal	ROO.26.3 3.03.72	2	3	11
73	Adanya Tender gagal	ROO.26.3 3.03.73	1	4	8
74	Dokumen persiapan pengadaan tidak lengkap	ROO.26.3 3.03.74	3	2	10
75	Proses pemilihan penyedia melebihi waktu yang ditetapkan	ROO.26.3 3.03.75	3	3	14
76	Gangguan Layanan pengadaan secara elektronik	ROO.26.3 3.03.76	1	2	3
77	Proses verifikasi penyedia yang terhambat	ROO.26.3 3.03.77	1	2	3
78	Terjadinya ketidaktepatan, keterlambatan, atau ketidakefektifan pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.	ROO.26.3 3.03.78	1	2	3

Dari hasil analisis risiko di atas terlihat bahwa skor nilai skala risiko untuk risiko strategis tertinggi pada skor 16 dan terendah pada skor 5. Sedangkan untuk risiko operasional skor tertinggi 16 dan skor terendah 4. Risiko dengan nilai di atas ambang batas risiko masuk menjadi risiko prioritas Sekretariat Daerah. Berikut adalah daftar risiko prioritas Sekretariat Daerah tahun 2024.

Tabel 3. 8. Daftar Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH					
I	Risiko Strategis OPD					
	Nihil					
II	Risiko Operasional OPD					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Kegiatan Penataan organisasi					

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Pengisian realisasi rencana aksi RB tidak tepat waktu	ROO.26.33.03.03	11	Kepala Bagian Organisasi	Keterlambatan OPD dalam menyampaikan data dan informasi	Pelaporan pada portal RB tidak menggunakan data terkini sehingga dapat mempengaruhi indeks Reformasi Birokrasi
2	Kegiatan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan					
	Fasilitasi keprotokolan tidak berjalan secara optimal.	ROO.26.33.03.06	12	Kepala Bagian Prokopim	Belum adanya SOP teknis keprotokolan yang baku, Kurangnya koordinasi antara penyelenggara acara dengan protokoler, kesiapan panitia dalam menyelenggarakan kegiatan, dan perubahan acara yang mendadak	Kepercayaan masyarakat menurun, Acara tidak berjalan tertib dan sesuai tata protokol.
	Fasilitasi komunikasi pimpinan/branding media massa kurang optimal.	ROO.26.33.03.07	10	Kepala Bagian Prokopim	SDM kurang memadai; alat/sarpras pendukung kurang memadai.	Kinerja tidak maksimal, Informasi kebijakan dan kegiatan pimpinan tidak tersampaikan secara luas, Citra dan branding Pemerintah Daerah kurang kuat, Capaian kinerja publikasi tidak maksimal.
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	ROO.26.33.03.09	7	Kepala Bagian Umum	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan antar unit belum optimal; Data dan informasi pendukung perencanaan tidak tersedia tepat waktu; Proses konsolidasi dan reviu dokumen perencanaan belum efektif.	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah tidak tersusun tepat waktu atau kurang berkualitas; Pelaksanaan program dan kegiatan tidak memiliki dasar perencanaan yang memadai; Pencapaian sasaran Perangkat Daerah tidak optimal.
	Terjadinya keterlambatan pelaksanaan	ROO.26.33.03.14	11	Kepala Bagian Umum	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM	Keterlambatan pengambilan keputusan

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	atau ketidaktepatan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah.				pelaksana evaluasi; Koordinasi antar Perangkat Daerah belum optimal; Keterlambatan penyampaian data dan dokumen pendukung; Sistem informasi kinerja belum terintegrasi optimal.	pimpinan; Ketidaktepatan penilaian capaian kinerja Perangkat Daerah; Terganggunya penyusunan laporan kinerja dan perencanaan; Menurunnya efektivitas program dan akuntabilitas kinerja.
4	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Terjadinya kesalahan atau keterlambatan penatausahaan serta pengujian/verifikasi keuangan SKPD.	ROO.26.33.03.16	11	Kepala Bagian Umum	Belum lengkapnya lampiran pendukung dokumen spj penatausahaan	Terhambatnya pencairan GU
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	ROO.26.33.03.20	7	Kepala Bagian Umum	Perencanaan kebutuhan pakaian dinas dan atribut belum disusun secara akurat; Koordinasi pelaksanaan pengadaan belum berjalan optimal; Proses verifikasi spesifikasi dan jumlah kebutuhan belum efektif.	Pakaian dinas dan atribut tidak tersedia tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan; Pelaksanaan tugas kedinasan ASN tidak didukung secara optimal; Ketertiban dan keseragaman aparatur dalam pelaksanaan tugas terganggu.
	Tidak terpenuhinya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	ROO.26.33.03.23	7	Kepala Bagian Umum	Tidak tersampainya informasi undangan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tidak meningkatnya kompetensi ASN Sekretariat Daerah
	Belum optimalnya sasaran sosialisasi kepada masyarakat terutama penjual dan pembeli Rokok	ROO.26.33.03.24	11	Kepala Bagian Umum	Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan minimnya informasi untuk membeli rokok yang berpita Cukai resmi	Tidak Optimalnya penggunaan Rokok di masyarakat secara Legal

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Ilegal (tidak berpita Cukai resmi)					
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Persediaan komponen instalasi listrik kurang	ROO.26.33.03.25	14	Kepala Bagian Umum	Kebutuhan komponen instalasi listrik tidak direncanakan dengan baik	Persediaan komponen instalasi listrik tidak sesuai dengan kebutuhan, pelayanan tidak maksimal
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan peralatan rumah tangga.	ROO.26.33.03.27	7	Kepala Bagian Umum	Perencanaan kebutuhan peralatan rumah tangga belum disusun secara akurat; Koordinasi pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga belum optimal; Proses verifikasi spesifikasi dan jumlah kebutuhan belum berjalan efektif.	Peralatan rumah tangga tidak tersedia tepat waktu atau tidak sesuai kebutuhan; Dukungan fasilitas operasional kantor menjadi terganggu; Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah menurun.
	Kekurangan persediaan Bahan logistik kantor	ROO.26.33.03.28	7	Kepala Bagian Umum	Penambahan jumlah pegawai dan efisiensi anggaran	Pelayanan internal/perkantoran tidak maksimal
	Tidak optimalnya pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah	ROO.26.33.03.31	10	Kepala Bagian Umum	Kegiatan/acara kunjungan tamu KDH/ WKDH/ Sekretariat Daerah tidak dapat diperkirakan jumlah dan waktunya	Tidak terpenuhinya kebutuhan makan minum KDH/WKDH, rapat dan kunjungn tamu pemerintah daerah
	Terjadinya keterlambatan, ketidakterlaksanaan, atau ketidakefektifan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	ROO.26.33.03.32	7	Kepala Bagian Umum	Perencanaan dan penjadwalan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD belum disusun secara optimal; Koordinasi antar SKPD dan unit terkait dalam penyelenggaraan rapat belum berjalan efektif; Dukungan administrasi dan teknis penyelenggaraan rapat belum	Proses koordinasi dan konsultasi antar SKPD tidak berjalan optimal; Penyelarasan kebijakan, program, dan kegiatan antar SKPD menjadi terhambat; Informasi dan keputusan hasil rapat tidak tersampaikan secara efektif.

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
					memadai.	
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau ketidaktepatan pengadaan kendaraan dinas.	ROO.26.33.03.33	7	Kepala Bagian Umum	Penetapan spesifikasi teknis kendaraan dinas belum dirumuskan secara jelas; Proses pengadaan dan verifikasi hasil pengadaan belum berjalan efektif; Koordinasi antara pengguna dan pengelola pengadaan kurang optimal.	Kendaraan dinas tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan operasional; Pelaksanaan tugas kedinasan menjadi kurang efektif.
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan peralatan dan mesin lainnya.	ROO.26.33.03.34	7	Kepala Bagian Umum	Perencanaan kebutuhan peralatan dan mesin belum akurat; Proses pengadaan dan penerimaan barang belum tertib.	Peralatan dan mesin tidak mendukung kelancaran operasional Perangkat Daerah; Efektivitas pelaksanaan tugas teknis menurun.
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.35	7	Kepala Bagian Umum	Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana belum disusun secara komprehensif; Koordinasi pelaksanaan pengadaan belum optimal; Proses pengawasan pelaksanaan pengadaan kurang efektif.	Sarana dan prasarana gedung tidak mendukung aktivitas perkantoran secara optimal; Kenyamanan dan kelancaran kerja terganggu.
	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidaktepatan pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.36	7	Kepala Bagian Umum	Penetapan kebutuhan dan spesifikasi gedung belum tepat; Proses pengadaan dan penetapan hasil pengadaan memerlukan waktu lebih lama.	Pemanfaatan gedung kantor tidak sesuai rencana; Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terganggu.
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Terjadinya gangguan, keterlambatan, atau ketidakterpenuhi	ROO.26.33.03.38	10	Kepala Bagian Umum	Pengelolaan dan pengawasan penyediaan layanan utilitas belum optimal;	Aktivitas perkantoran dan layanan pemerintahan terganggu;

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	an penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.				Ketergantungan pada pihak penyedia jasa eksternal.	Pelaksanaan tugas ASN tidak berjalan normal.
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Kendaraan dinas jabatan tidak terpelihara	ROO.26.33.03.41	14	Kepala Bagian Umum	Usia kendaraan operasional dinas banyak sudah diatas 10 tahun	Kendaraan dinas jabatan rusak
	Kendaraan dinas operasional atau lapangan rusak parah	ROO.26.33.03.42	14	Kepala Bagian Umum	Belum tersusun jadwal pemeliharaan berdasarkan skala prioritas	Mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan membengkakny a biaya perawatan kendaraan dinas
	Peralatan Kantor banyak yang rusak	ROO.26.33.03.43	11	Kepala Bagian Umum	Belum tersusun jadwal pemeliharaan berdasarkan skala prioritas	Menghambat kelancaraan dalam bekerja
	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian , atau ketidakefektifan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.44	14	Kepala Bagian Umum	Belum tersusun jadwal pemeliharaan berdasarkan skala prioritas	Menghambat kelancaraan dalam bekerja
	Belum terakomodirnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor secara memadai	ROO.26.33.03.45	14	Kepala Bagian Umum	Banyaknya sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang layak dan besarnya biaya pemeliharaan gedung bertingkat	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor
10	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
	Terjadinya keterlambatan atau ketidakterlaksanaan pelaksanaan medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.33.03.47	11	Kepala Bagian Umum	Perencanaan dan penjadwalan medical check up belum optimal; Koordinasi pelaksanaan dengan pihak terkait belum efektif.	Medical check up tidak dilaksanakan tepat waktu atau tidak terlaksana; Pemantauan kondisi kesehatan pimpinan tidak optimal.
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan pakaian dinas dan atribut	ROO.26.33.03.48	11	Kepala Bagian Umum	Perencanaan kebutuhan pakaian dinas dan atribut belum akurat; Proses penyediaan dan verifikasi	Pakaian dinas dan atribut tidak tersedia tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan; Dukungan

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.				spesifikasi belum efektif.	perlengkapan kedinasan pimpinan tidak optimal.
11	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					
	Nihil					
B	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
1	Kegiatan Administrasi tata pemerintahan					
	Terjadinya ketidakefektifan atau keterlambatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.	ROO.26.33.03.54	7	Kepala Bagian Pemerintahan	OPD terlambat dalam penyampaian data dukung	Kinerja ASN kurang
2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan serta pengukuran capaian kinerja kesejahteraan sosial.	ROO.26.33.03.56	13	Kepala Bagian Kesra	Keterbatasan Sumber Daya; Monitoring dan Evaluasi yang belum berjalan optimal; Penyebaran Informasi kepada masyarakat yang kurang optimal.	Meningkatnya risiko penyimpangan penggunaan bantuan yang mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran; Program Kegiatan tidak berjalan optimal.
3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.	ROO.26.33.03.58	7	Kepala Bagian Hukum	Keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang kompeten; Koordinasi yang kurang efektif dengan instansi terkait.	Proses legislasi dan regulasi menjadi tertunda; Kredibilitas pemerintah daerah dapat menurun.
4	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah					
	Terjadinya keterlambatan, ketidaktepatan, atau ketidakefektifan fasilitasi kerja sama dalam negeri.	ROO.26.33.03.61	7	Kepala Bagian Pemerintahan	Keterlambatan dalam penyampaian data dukung	Kinerja ASN kurang
C	Program Perekonomian dan Pembangunan					
1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					
	Terjadinya ketidaktepatan, keterlambatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi	ROO.26.33.03.63	11	Kepala Bagian Perekonomian	Belum dipahaminya regulasi terkait penatausahaan keuangan bagi BLUD di Kabupaten	Regulasi baru terkait penatausahaan keuangan belum dipakai

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.					
2	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					
	Nihil					
3	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.	ROO.26.33.03.70	11	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Jadwal monitoring belum terkoordinasi dengan baik; Keterbatasan sumber daya (manusia dan peralatan); Kurang koordinasi antara pelaksana, pengawas, dan stakeholder.	Tertundanya identifikasi permasalahan di lapangan; Meningkatnya risiko penyimpangan yang tidak terdeteksi; Tumpang tindih tugas monitoring.
4	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
	Proses pengadaan barang/jasa pemerintah di OPD belum optimal	ROO.26.33.03.72	11	Kepala Bagian PBJ	Pelaku pengadaan di OPD belum memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan baik	Proses pengadaan barang/jasa pada perencanaan dan persiapan terhambat dan terlambat dari jadwal RUP
	Adanya Tender gagal	ROO.26.33.03.73	8	Kepala Bagian PBJ	Tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan atau tidak ada yang memasukkan penawaran	Tender ulang/batal
	Dokumen persiapan pengadaan tidak lengkap	ROO.26.33.03.74	10	Kepala Bagian PBJ	PPK kurang memahami persyaratan dokumen yang harus dilengkapi saat mengajukan tender ke Bagian PBJ	Dokumen persiapan pengadaan dikembalikan ke PPK
	Proses pemilihan penyedia melebihi waktu yang ditetapkan	ROO.26.33.03.75	14	Kepala Bagian PBJ	Kurang cermatnya pokja pemilihan atau pejabat pengadaan menyusun jadwal pemilihan atau kelalaian dalam melaksanakan pemilihan sesuai jadwal	Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai jadwal

D. Pengendalian yang Sudah dan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan Dilakukan

Pengendalian yang sudah dilakukan berisi hasil identifikasi terhadap

pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis Risiko. Adapun pengendalian yang masih dibutuhkan berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Uraian pengendalian yang sudah ada dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo tercantum dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis OPD						
	Nihil						
II	Risiko Operasional OPD						
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Kegiatan Penataan organisasi						
	Pengisian realisasi rencana aksi RB tidak tepat waktu	ROO.26.33.03.03	Adanya surat tugas atau penunjukan personel khusus di setiap unit kerja yang bertanggung jawab menginput data ke aplikasi (seperti portal RB Nasional), Pimpinan instansi mengeluarkan instruksi atau surat pemberitahuan mengenai jadwal periode pengisian, Adanya saluran komunikasi (seperti WhatsApp Group) antara sekretariat RB dengan para PIC unit kerja untuk pengingat (reminder), Penggunaan sistem aplikasi internal atau nasional yang membatasi waktu input (sistem kunci otomatis setelah tenggat waktu).	Pengisian sering dilakukan di detik-detik terakhir (last minute), sehingga dokumen pendukung yang diunggah seringkali tidak relevan atau kurang lengkap.	Membuat jadwal detil yang mencakup batas waktu internal, Mengadakan sesi asistensi bersama tim sekretariat untuk memverifikasi kualitas bukti dukung sebelum diunggah, Membangun atau menggunakan lembar kendali (seperti shared spreadsheet) yang bisa dilihat pimpinan secara real-time untuk memantau unit mana yang belum mengisi.	Bagian Organisasi	Triwulan III 2026
2	Kegiatan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan						
	Fasilitasi keprotokolan tidak berjalan secara	ROO.26.33.03.06	Pelaksanaan tugas keprotokolan dilakukan	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat	Penyusunan pedoman kerja keprotokolan yang lebih	Bagian Protokol dan Komunikasi	Triwulan III 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	optimal		berdasarkan agenda pimpinan yang sudah ditetapkan; Koordinasi teknis keprotokolan biasanya dilakukan secara lisan dan situasional menjelang kegiatan.	dilaksanakan secara konsisten.	telas sebagai acuan pelaksanaan tugas di lapangan; Penjadwalan dan pembagian tugas petugas protokol yang lebih terencana untuk menghindari tumpang tindih.	Pimpinan	
	Fasilitasi komunikasi pimpinan/branding media massa kurang optimal.	ROO.26.33.03.07	Penyampaian informasi kegiatan dan kebijakan pimpinan kepada media massa melalui rilis berita dan dokumentasi kegiatan;Koordinasi antara pimpinan, protokol, dan pengelola kehumasan dalam peliputan kegiatan tertentu;Pemanfaatan media sosial resmi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Penyusunan rencana komunikasi pimpinan yang lebih terarah dan berkelanjutan, termasuk penentuan isu prioritas dan pesan utama;Penjadwalan dan penguatan hubungan kerja dengan media massa agar pemberitaan lebih konsisten dan seimbang;Peningkatan kualitas konten dan waktu penyampaian informasi agar selaras dengan momentum kegiatan pimpinan.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Triwulan III 2026
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	ROO.26.33.03.09	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah telah mengacu pada jadwal perencanaan daerah yang ditetapkan; Pengumpulan usulan program dan kegiatan dilakukan dari unit kerja sebagai bahan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Penegasan jadwal internal penyusunan dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah; Pengendalian progres penyusunan dokumen secara periodik sebelum batas waktu penyampaian;	Bagian Umum	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
			penyusunan dokumen.		Pengecekan substansi dokumen untuk memastikan kesesuaian dengan arah kebijakan daerah.		
	Terjadinya keterlambatan pelaksanaan atau ketidaktepatan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	ROO.26.33.0 3.14	Evaluasi kinerja perangkat daerah telah direncanakan sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja; Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan dari unit kerja sebagai bahan evaluasi; Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja perangkat daerah.	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Penetapan jadwal evaluasi kinerja yang lebih pasti dan dipatuhi oleh seluruh perangkat daerah; Penguatan validasi data kinerja sebelum dilakukan evaluasi; Penegasan tindak lanjut hasil evaluasi agar benar-benar digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
4	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Terjadinya kesalahan atau keterlambatan penatausahaan serta pengujian/verifikasi keuangan SKPD.	ROO.26.33.0 3.16	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan sesuai ketentuan; Dokumen keuangan diperiksa sebelum dilakukan pengujian dan verifikasi; Koordinasi dilakukan dengan unit terkait apabila terdapat kekurangan dokumen.	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan secara konsisten.	Penegasan tahapan penatausahaan dan verifikasi keuangan yang harus dipenuhi sebelum proses berikutnya; Pemeriksaan berjenjang atas dokumen keuangan untuk mengurangi kesalahan berulang.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	ROO.26.33.0 3.20	Pengadaan pakaian dinas dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku;Spesifikasi pakaian dan atribut ditetapkan sebagai	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Penetapan jadwal pengadaan yang lebih awal agar tidak berbenturan dengan kebutuhan operasional;Pengendalian kesesuaian spesifikasi dan	Bagian Umum	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
			acuan pelaksanaan pengadaan.		jumlah pakaian dinas sebelum proses pengadaan dilaksanakan; Koordinasi lebih awal dengan penyedia untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman.		
	Tidak terpenuhinya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	ROO.26.33.03.23	Pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Pemetaan kebutuhan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi jabatan; Penetapan prioritas peserta diklat sesuai kebutuhan organisasi; Pemantauan realisasi pelaksanaan diklat agar sesuai rencana.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Belum optimalnya sasaran sosialisasi kepada masyarakat terutama penjual dan pemebli Rokok Ilegal (tidak berpita Cukai resmi)	ROO.26.33.03.24	Sosialisasi terkait rokok ilegal telah dilakukan melalui kegiatan tertentu kepada masyarakat; Informasi disampaikan melalui media cetak dan media sosial pemerintah daerah.	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Penentuan sasaran sosialisasi yang lebih spesifik, terutama pelaku usaha dan konsumen rokok; Penyesuaian materi sosialisasi agar mudah dipahami dan tepat sasaran; Pelaksanaan sosialisasi secara langsung di lokasi yang berpotensi terjadi peredaran rokok ilegal; Koordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat pesan dan jangkauan sosialisasi.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Persediaan komponen intalasi listrik kurang	ROO.26.33.03.25	Persediaan komponen instalasi listrik telah dicatat dan dikelola oleh petugas	Pengendalian persediaan belum optimal karena belum	Melakukan pengecekan dan pembaruan data persediaan secara rutin, menetapkan	Bagian Umum	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
			terkait melalui pencatatan manual/administratif serta dilakukan pengadaan sesuai kebutuhan kegiatan.	adanya pemantauan stok secara berkala, sehingga persediaan komponen instalasi listrik sering tidak mencukupi saat dibutuhkan.	stok minimum komponen instalasi listrik, serta merencanakan pengadaan lebih awal untuk mencegah kekurangan persediaan.		
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan peralatan rumah tangga.	ROO.26.33.03.27	Penyediaan peralatan rumah tangga telah direncanakan melalui usulan kebutuhan dan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Proses perencanaan dan pengadaan belum sepenuhnya mempertimbangkan waktu kebutuhan dan spesifikasi barang, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan atau ketidaksesuaian peralatan.	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan, melakukan koordinasi lebih awal dengan pihak terkait, serta memastikan kesesuaian spesifikasi sebelum proses pengadaan dilaksanakan.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Kekurangan persediaan Bahan logistik kantor	ROO.26.33.03.28	Pengelolaan persediaan bahan logistik kantor telah dilakukan melalui pencatatan penggunaan dan pengadaan sesuai kebutuhan operasional.	Pengendalian persediaan belum optimal karena belum adanya pemantauan stok secara berkala dan penetapan batas minimum persediaan, sehingga berpotensi terjadi kekurangan logistik.	Melakukan inventarisasi dan monitoring persediaan secara rutin, menetapkan stok minimum bahan logistik kantor, serta merencanakan pengadaan secara tepat waktu sesuai kebutuhan.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Tidak optimalnya pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah	ROO.26.33.03.31	Pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dengan melibatkan petugas penerima tamu dan fasilitas pendukung	Pelayanan belum optimal karena keterbatasan sarana pendukung, kesiapan petugas, serta koordinasi yang belum	Meningkatkan koordinasi dan kesiapan petugas, melengkapi sarana pendukung pelayanan tamu, serta melakukan evaluasi pelayanan secara berkala	Bagian Umum	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
			yang tersedia.	maksimal dalam menghadapi kunjungan tamu.	untuk meningkatkan kualitas layanan.		
	Terjadinya keterlambatan, ketidaklaksanaan, atau ketidakefektifan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	ROO.26.33.03.32	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD telah direncanakan melalui jadwal kegiatan serta pelaksanaan rapat sesuai ketentuan dan ketersediaan anggaran	Perencanaan jadwal dan koordinasi antar SKPD belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, pembatalan rapat, atau rapat yang kurang efektif.	Menyusun jadwal rapat secara lebih terencana dan terkoordinasi, memperkuat komunikasi antar SKPD, serta melakukan evaluasi pelaksanaan rapat untuk meningkatkan efektivitas hasil rapat.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau ketidaktepatan pengadaan kendaraan dinas.	ROO.26.33.03.33	Pengadaan kendaraan dinas telah direncanakan melalui penyusunan kebutuhan, penetapan spesifikasi teknis, serta pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perencanaan kebutuhan dan spesifikasi belum sepenuhnya akurat serta pengendalian waktu pengadaan belum optimal, sehingga berpotensi terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian kendaraan yang diperoleh.	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis kendaraan dinas, memperkuat pengawasan proses pengadaan, serta melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pengadaan secara berkala.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan peralatan dan mesin lainnya.	ROO.26.33.03.34	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya telah direncanakan melalui penyusunan kebutuhan dan spesifikasi teknis serta dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku.	Perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis belum sepenuhnya tepat serta pengendalian waktu pelaksanaan pengadaan belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan atau	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis, memperkuat pengawasan dan monitoring proses pengadaan, serta melakukan evaluasi hasil pengadaan agar sesuai dengan kebutuhan dan jadwal.	Bagian Umum	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
				ketidaksesuaian barang.			
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.0 3.35	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya telah direncanakan melalui penyusunan kebutuhan, spesifikasi teknis, serta pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis belum sepenuhnya akurat serta pengendalian waktu pelaksanaan pengadaan belum optimal, sehingga berpotensi terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian sarana dan prasarana.	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis, memperkuat pengawasan dan monitoring pelaksanaan pengadaan, serta melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian hasil pengadaan dengan kebutuhan.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidaktepatan pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.0 3.36	Pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya telah direncanakan melalui perencanaan kebutuhan, penyusunan dokumen teknis, serta pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perencanaan kebutuhan, spesifikasi, dan pengendalian waktu pelaksanaan pengadaan belum sepenuhnya optimal, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidaktepatan hasil pengadaan.	Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan dan dokumen teknis, memperkuat pengawasan dan monitoring proses pengadaan, serta melakukan evaluasi pelaksanaan secara berkala agar pengadaan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Terjadinya gangguan, keterlambatan, atau ketidakterpenuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	ROO.26.33.0 3.38	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik telah dikelola melalui kerja sama dengan penyedia layanan serta penganggaran dan pembayaran rutin sesuai ketentuan.	Ketergantungan pada pihak penyedia layanan serta keterbatasan pemantauan layanan berpotensi menyebabkan gangguan,	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan penyedia layanan, melakukan monitoring layanan secara berkala, serta menyiapkan langkah antisipatif untuk	Bagian Umum	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
				keterlambatan, atau ketidakterpenuhan kebutuhan layanan.	meminimalkan dampak gangguan terhadap operasional.		
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Kendaraan dinas jabatan tidak terpelihara	ROO.26.33.0 3.41	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan telah diatur melalui ketentuan penggunaan dan pemeliharaan serta dialokasikan anggaran pemeliharaan secara rutin.	Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan kepatuhan pengguna kendaraan belum optimal, sehingga kondisi kendaraan dinas jabatan kurang terpelihara dengan baik.	Meningkatkan pengawasan dan penjadwalan pemeliharaan kendaraan dinas secara berkala, memperjelas tanggung jawab pengguna, serta melakukan evaluasi kondisi kendaraan untuk menjaga kelayakan operasional.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Kendaraan dinas operasional atau lapangan rusak parah	ROO.26.33.0 3.42	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan telah direncanakan melalui pengaturan penggunaan, perawatan rutin, serta penganggaran pemeliharaan sesuai ketentuan.	Pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan kondisi kendaraan belum optimal, sehingga kerusakan tidak terdeteksi sejak dini dan mengakibatkan kerusakan parah.	Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan secara berkala, meningkatkan pengawasan penggunaan kendaraan, serta merencanakan perbaikan atau penggantian kendaraan agar mendukung kelancaran operasional.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Peralatan Kantor banyak yang rusak	ROO.26.33.0 3.43	Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan kantor telah diatur melalui pencatatan aset serta penganggaran pemeliharaan sesuai ketentuan.	Pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan peralatan kantor belum optimal, sehingga kerusakan tidak tertangani sejak dini dan jumlah peralatan rusak meningkat.	Melakukan inventarisasi dan pengecekan kondisi peralatan kantor secara berkala, meningkatkan kedisiplinan penggunaan, serta merencanakan pemeliharaan atau penggantian peralatan agar mendukung kelancaran kerja.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Terjadinya keterlambatan,	ROO.26.33.0	Pemeliharaan dan rehabilitasi	Perencanaan teknis,	Meningkatkan kualitas	Bagian Umum	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	ketidaksesuaian, atau ketidakefektifan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	3.44	gedung kantor/bangunan lainnya telah direncanakan melalui penetapan kebutuhan, penyusunan rencana kerja, serta penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	pengendalian pelaksanaan, dan pengawasan hasil pekerjaan belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, ketidaksesuaian, atau pemeliharaan yang kurang efektif.	perencanaan teknis dan jadwal pekerjaan, memperkuat pengawasan dan monitoring pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi, serta melakukan evaluasi hasil pekerjaan secara berkala untuk memastikan efektivitas.		
	Belum terakomodirnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor secara memadai	ROO.26.33.0 3.45	Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor telah direncanakan melalui pengusulan kebutuhan dan penganggaran sesuai prioritas yang tersedia.	Kebutuhan pemeliharaan belum seluruhnya teridentifikasi dan terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga pemeliharaan sarana dan prasarana belum dilakukan secara memadai.	Melakukan pendataan dan penilaian kondisi sarana dan prasarana secara menyeluruh, menyusun skala prioritas pemeliharaan, serta mengusulkan penganggaran secara lebih tepat dan berkelanjutan.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
B	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
1	Kegiatan Administrasi tata pemerintahan						
	Terjadinya ketidakefektifan atau keterlambatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.	ROO.26.33.0 3.54	Dilakukan Rapat Persiapan, Bimtek Penyusunan Laporan dan dibuatkan surat edaran penyusunan laporan	Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan penyusunan laporan dilaksanakan sesuai peraturan yg berlaku	Monitoring bersama tim dari tingkat lebih atas yaitu provinsi atau pusat	Bagian Pemerintahan	Triwulan II 2026
2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi dan	ROO.26.33.0 3.56	Dilaksanakan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan;	Pengendalian sudah ada namun belum dapat berjalan secara	Monitoring dan evaluasi bersama pemangku kepentingan dan	Bagian Kesra	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	pelaksanaan kebijakan serta pengukuran capaian kinerja kesejahteraan sosial.		Dilaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat; Dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke beberapa titik sasaran.	optimal ke seluruh penerima bantuan	menambah jumlah titik sasaran kunjungan lapangan		
3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.	ROO.26.33.0 3.58	Tersedianya aplikasi fasilitasi penyusunan produk hukum daerah (E-Koreksi); Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan Propemperda atau Propemperkada; Rapat Koordinasi dengan perangkat daerah pengusul untuk menyamakan persepsi terhadap substansi, dasar hukum, dan urgensi produk hukum yang akan disusun.	Pengendalian sudah ada namun belum mampu menangani keterlambatan atau ketidakpastian fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Penyusunan target waktu (<i>timeline</i>) fasilitasi penyusunan produk hukum yang disepakati bersama OPD pengusul; Monitoring dan evaluasi proses fasilitasi penyusunan produk hukum, termasuk pencatatan tahapan dan kendala yang dihadapi selama proses berlangsung.	Bagian Hukum	Triwulan III 2026
4	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah						
	Terjadinya keterlambatan, ketidaktepatan, atau ketidakefektifan fasilitasi kerja sama dalam negeri.	ROO.26.33.0 3.61	Dilaksanakan Rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengendalian sudah ada namun kadang kalah cepat dengan dinamisasi perkembangan masyarakat	Monitoring kegiatan bersama pemangku kegiatan terkait	Bagian Pemerintahan	Triwulan IV 2026
C	Program Perekonomian dan Pembangunan						
1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
	Terjadinya ketidaktepatan, keterlambatan, atau ketidakefektifan	ROO.26.33.0 3.63	Adanya Regulasi Sektor, Pembentukan Tim Pembina, Pelaporan Periodik, dan Pelaksanaan Rapat	Adanya Asimetri Informasi, Analisis yang Dangkal, Komunikasi Silo, dan	Pembentukan Penyusunan Key Performance Indicators (KPI) Terpadu, Agenda Sinkronisasi Terjadwal, dan	Bagian Perekonomian	Triwulan IV 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.		Koordinasi secara rutin	Kapasitas SDM Pengawas kurang memadai	Peningkatan Kompetensi Analis		
2	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						
	Nihil						
3	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.	ROO.26.33.03.70	Sudah tersedianya aplikasi SIEMON BANGUN dalam rangka digitalisasi sistem monitoring dan evaluasi pembangunan; Diadakan Rapat Koordinasi POK per triwulan dengan seluruh Perangkat Daerah; Diadakan Kunjungan lapangan dalam rangka monev fisik pembangunan.	Kunjungan ke lapangan dalam rangka monev fisik pembangunan belum dilakukan secara masif dan berkelanjutan	Penyusunan jadwal kunjungan ke lapangan dalam rangka monev fisik pembangunan secara berkelanjutan.	Bagian Administrasi Pembangunan	Triwulan II Tahun 2026
4	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						
	Proses pengadaan barang/jasa pemerintah di OPD belum optimal		Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi proses pengadaan barang/jasa; Memberikan bimbingan teknis, konsultasi dan pendampingan proses PBJ kepada Pelaku pengadaan barang/jasa di OPD	Pengendalian sudah dilaksanakan, namun proses PBJ di OPD belum optimal.	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dan berkala.	Bagian PBJ	Triwulan III 2026
	Adanya Tender gagal		Melakukan Tender ulang/membatalkan Tender	Sudah dilaksanakan pengendalian namun belum optimal	Menyusun jadwal pelaksanaan tender	Bagian PBJ	Triwulan I 2026
	Dokumen persiapan pengadaan tidak lengkap		Melakukan koordinasi dengan PPK dalam kegiatan review	Pengendalian sudah dilaksanakan, namun	Melakukan koordinasi dengan PPK agar dokumen	Bagian PBJ	Triwulan III 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
			dokumen perencanaan	masih terjadi ketidاكلengkapan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa.	persiapan pengadaan segera dikirim Ke Bagian PBJ sehingga dapat dilakukan tender.		
	Proses pemilihan penyedia melebihi waktu yang ditetapkan		Monitoring jadwal pemilihan penyedia	Pelaksanaan pengendalian belum memadai.	Monitoring jadwal pemilihan secara rinci pada setiap tahapan yang harus dilalui	Bagian PBJ	Triwulan III 2026

BAB III

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo memastikan telah terdapat komunikasi internal dan Eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Informasi dan Komunikasi yang dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	B	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis OPD						
	Nihil						
II	Resiko Operasional OPD						
1	Membuat jadwal detil yang mencakup batas waktu internal, Mengadakan sesi asistensi bersama tim sekretariat untuk memverifikasi kualitas bukti dukung sebelum diunggah, Membangun atau menggunakan lembar kendali (seperti shared spreadsheet) yang bisa dilihat pimpinan secara real-time untuk memantau unit mana yang belum mengisi.	Rapat koordinasi internal	Sekretariat Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan III 2026		
2	Penyusunan pedoman kerja keprotokolan yang lebih jelas sebagai acuan pelaksanaan tugas di lapangan; Penjadwalan dan pembagian tugas petugas protokol yang lebih terencana untuk menghindari tumpang tindih.	Surat edaran, SOP tertulis, rapat internal	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Petugas protokol, Kabag Prokompin	Triwulan III 2026		
3	Penyusunan rencana komunikasi pimpinan yang lebih terarah dan berkelanjutan, termasuk penentuan isu prioritas dan pesan utama;	Rapat koordinasi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bupati dan Wakil Bupati, Media, OPD	Triwulan III 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	B	c	d	e	f	g	h
	Penjadwalan dan penguatan hubungan kerja dengan media massa agar pemberitaan lebih konsisten dan seimbang; Peningkatan kualitas konten dan waktu penyampaian informasi agar selaras dengan momentum kegiatan pimpinan.						
4	Penegasan jadwal internal penyusunan dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah; Pengendalian progres penyusunan dokumen secara periodik sebelum batas waktu penyampaian; Pengecekan substansi dokumen untuk memastikan kesesuaian dengan arah kebijakan daerah.	Rapat koordinasi, surat resmi, aplikasi SIPD	Bagian Umum dan Bagian Administrasi Pembangunan	Perencana	Triwulan II 2026		
5	Penetapan jadwal evaluasi kinerja yang lebih pasti dan dipatuhi oleh seluruh perangkat daerah; Penguatan validasi data kinerja sebelum dilakukan evaluasi; Penegasan tindak lanjut hasil evaluasi agar benar-benar digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja.	Rapat monitoring dan evaluasi, aplikasi kinerja SISAIP, laporan tertulis	Bagian Umum	Pimpinan Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
6	Penegasan tahapan penatausahaan dan verifikasi keuangan yang harus dipenuhi sebelum proses berikutnya; Pemeriksaan berjenjang atas	Rapat koordinasi, Aplikasi SIPD	Bagian Umum	Pimpinan Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	B	c	d	e	f	g	h
	dokumen keuangan untuk mengurangi kesalahan berulang.						
7	Penetapan jadwal pengadaan yang lebih awal agar tidak berbenturan dengan kebutuhan operasional; Pengendalian kesesuaian spesifikasi dan jumlah pakaian dinas sebelum proses pengadaan dilaksanakan; Koordinasi lebih awal dengan penyedia untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman.	Rapat koordinasi, surat dinas.	Bagian Umum	Pimpinan Sekretariat Daerah, Penyedia	Triwulan II 2026		
8	Pemetaan kebutuhan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi jabatan; Penetapan prioritas peserta diklat sesuai kebutuhan organisasi; Pemantauan realisasi pelaksanaan diklat agar sesuai rencana.	Rapat koordinasi, surat tugas	Bagian Umum	ASN Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
9	Penentuan sasaran sosialisasi yang lebih spesifik, terutama pelaku usaha dan konsumen rokok; Penyesuaian materi sosialisasi agar mudah dipahami dan tepat sasaran; Pelaksanaan sosialisasi secara langsung di lokasi yang berpotensi terjadi peredaran rokok ilegal; Koordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat pesan dan	Sosialisasi tatap muka, banner, media sosial	Sekretariat Daerah	Pelaku usaha, masyarakat	Triwulan II 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	B	c	d	e	f	g	h
	jangkauan sosialisasi.						
10	Melakukan pengecekan dan pembaruan data persediaan secara rutin, menetapkan stok minimum komponen instalasi listrik, serta merencanakan pengadaan lebih awal untuk mencegah kekurangan persediaan.	Laporan Permintaan Bahan	Bagian Umum	Petugas teknis	Triwulan II 2026		
11	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan, melakukan koordinasi lebih awal dengan pihak terkait, serta memastikan kesesuaian spesifikasi sebelum proses pengadaan dilaksanakan.	Rapat koordinasi, surat dinas	Bagian PBJ	Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan II 2026		
12	Melakukan inventarisasi dan monitoring persediaan secara rutin, menetapkan stok minimum bahan logistik kantor, serta merencanakan pengadaan secara tepat waktu sesuai kebutuhan.	Laporan Permintaan Bahan	Bagian Umum	Petugas teknis	Triwulan II 2026		
13	Meningkatkan koordinasi dan kesiapan petugas, melengkapi sarana pendukung pelayanan tamu, serta melakukan evaluasi pelayanan secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan.	Rapat koordinasi	Bagian Umum	Pimpinan	Triwulan II 2026		
14	Menyusun jadwal rapat secara lebih terencana dan terkoordinasi, memperkuat komunikasi antar	Surat undangan	Bagian Umum	Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan II 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	B	c	d	e	f	g	h
	SKPD, serta melakukan evaluasi pelaksanaan rapat untuk meningkatkan efektivitas hasil rapat.						
15	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis kendaraan dinas, memperkuat pengawasan proses pengadaan, serta melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pengadaan secara berkala.	Rapat koordinasi, laporan monitoring	Bagian Umum	Pimpinan, Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan II 2026		
16	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis, memperkuat pengawasan dan monitoring proses pengadaan, serta melakukan evaluasi hasil pengadaan agar sesuai dengan kebutuhan dan jadwal.	Rapat koordinasi, Laporan tertulis	Bagian PBJ	Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan II 2026		
17	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis, memperkuat pengawasan dan monitoring pelaksanaan pengadaan, serta melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian hasil pengadaan dengan kebutuhan.	Rapat koordinasi, Laporan tertulis	Bagian PBJ	Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan II 2026		
18	Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan dan dokumen teknis, memperkuat pengawasan dan monitoring	Rapat koordinasi, Laporan tertulis	Bagian PBJ	Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan II 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	B	c	d	e	f	g	h
	proses pengadaan, serta melakukan evaluasi pelaksanaan secara berkala agar pengadaan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.						
19	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan penyedia layanan, melakukan monitoring layanan secara berkala, serta menyiapkan langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap operasional.	Rapat koordinasi, Laporan tertulis	Bagian PBJ	Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan II 2026		
20	Meningkatkan pengawasan dan penjadwalan pemeliharaan kendaraan dinas secara berkala, memperjelas tanggung jawab pengguna, serta melakukan evaluasi kondisi kendaraan untuk menjaga kelayakan operasional.	Rapat evaluasi, laporan layanan	Bagian Umum	Pimpinan Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
21	Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan secara berkala, meningkatkan pengawasan penggunaan kendaraan, serta merencanakan perbaikan atau penggantian kendaraan agar mendukung kelancaran operasional.	Laporan Perawatan	Bagian Umum	Pimpinan Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
22	Melakukan inventarisasi dan pengecekan kondisi peralatan kantor secara berkala, meningkatkan kedisiplinan penggunaan, serta merencanakan pemeliharaan atau penggantian peralatan agar mendukung	Laporan Perawatan	Bagian Umum	Pimpinan Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	B	c	d	e	f	g	h
	kelancaran kerja.						
23	Meningkatkan kualitas perencanaan teknis dan jadwal pekerjaan, memperkuat pengawasan dan monitoring pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi, serta melakukan evaluasi hasil pekerjaan secara berkala untuk memastikan efektivitas.	Laporan Inventaris	Bagian Umum	Pimpinan Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
24	Melakukan pendataan dan penilaian kondisi sarana dan prasarana secara menyeluruh, menyusun skala prioritas pemeliharaan, serta mengusulkan penganggaran secara lebih tepat dan berkelanjutan.	Rapat koordinasi	Bagian Umum	Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan II 2026		
25	Monitoring bersama tim dari tingkat lebih atas yaitu provinsi atau pusat	Rapat koordinasi	Bagian Umum	Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan II 2026		
26	Monitoring dan evaluasi bersama pemangku kepentingan dan menambah jumlah titik sasaran kunjungan lapangan	Rapat koordinasi	Bagian Umum	Organisasi Perangkat Daerah	Tahun 2026		
27	Penyusunan target waktu (timeline) fasilitasi penyusunan produk hukum yang disepakati bersama OPD pengusul; Monitoring dan evaluasi proses fasilitasi penyusunan produk hukum, termasuk pencatatan	Rapat koordinasi	Bagian Hukum	Organisasi Perangkat Daerah Pengusul	Triwulan III 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	B	c	d	e	f	g	h
	tahapan dan kendala yang dihadapi selama proses berlangsung.						
28	Monitoring kegiatan bersama pemangku kegiatan terkait	Rapat koordinasi	Organisasi Perangkat Daerah	Pimpinan	Triwulan IV 2026		
29	Pembentukan Penyusunan Key Performance Indicators (KPI) Terpadu, Agenda Sinkronisasi Terjadwal, dan Peningkatan Kompetensi Analis	Workshop, rapat teknis	Organisasi Perangkat Daerah	Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan IV 2026		
30	Penyusunan jadwal kunjungan ke lapangan dalam rangka monev fisik pembangunan secara berkelanjutan.	Workshop, rapat teknis	Bagian Organisasi	Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan II Tahun 2026		
31	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dan berkala.	Kunjungan lapangan, laporan	OPD teknis	Pimpinan	Triwulan III 2026		
32	Menyusun jadwal pelaksanaan tender	Aplikasi LPSE, Surat Dinas	Bagian PBJ	Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan I 2026		
33	Melakukan koordinasi dengan PPK agar dokumen persiapan pengadaan segera dikirim Ke Bagian PBJ sehingga dapat dilakukan tender.	Rapat koordinasi	Bagian Umum	Bagian PBJ	Triwulan III 2026		
34	Monitoring jadwal pemilihan secara rinci pada setiap tahapan yang harus dilalui	Aplikasi LPSE, Rapat Koordinasi	Pokja	Organisasi Perangkat Daerah	Triwulan III 2026		

BAB V
RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

A. Pemantauan Berkelanjutan.

Adapun pemantauan yang disampaikan dalam dokumen ini adalah berupa pemantauan berkelanjutan yang secara detail berisikan metode pemantauan yang dilakukan bagi setiap rencana tindak pengendalian, penanggung jawab pemantauan, serta waktu pelaksanaannya. Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana direncanakan. Adapun rancangan pemantauan yang dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 5.1. Rencana Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern Yang Dibutuhkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis OPD					
	Nihil					
II	Resiko Operasional OPD					
1	Membuat jadwal detil yang mencakup batas waktu internal, Mengadakan sesi asistensi bersama tim sekretariat untuk memverifikasi kualitas bukti dukung sebelum diunggah, Membangun atau menggunakan lembar kendali (seperti shared spreadsheet) yang bisa dilihat pimpinan secara real-time untuk memantau unit mana yang belum mengisi.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan III 2026		
2	Penyusunan pedoman kerja keprotokolan yang lebih jelas sebagai acuan pelaksanaan tugas di lapangan; Penjadwalan dan pembagian tugas petugas protokol yang lebih terencana untuk menghindari tumpang	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan III 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
	tindh.					
3	Penyusunan rencana komunikasi pimpinan yang lebih terarah dan berkelanjutan, termasuk penentuan isu prioritas dan pesan utama; Penjadwalan dan penguatan hubungan kerja dengan media massa agar pemberitaan lebih konsisten dan seimbang; Peningkatan kualitas konten dan waktu penyampaian informasi agar selaras dengan momentum kegiatan pimpinan.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan III 2026		
4	Penegasan jadwal internal penyusunan dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah; Pengendalian progres penyusunan dokumen secara periodik sebelum batas waktu penyampaian; Pengecekan substansi dokumen untuk memastikan kesesuaian dengan arah kebijakan daerah.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
5	Penetapan jadwal evaluasi kinerja yang lebih pasti dan dipatuhi oleh seluruh perangkat daerah; Penguatan validasi data kinerja sebelum dilakukan evaluasi; Penegasan tindak lanjut hasil evaluasi agar benar-benar digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
6	Penegasan tahapan penatausahaan dan verifikasi keuangan yang harus dipenuhi sebelum proses berikutnya; Pemeriksaan berjenjang atas dokumen keuangan untuk mengurangi kesalahan berulang.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
7	Penetapan jadwal pengadaan yang lebih awal agar tidak berbenturan dengan kebutuhan operasional; Pengendalian kesesuaian	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
	spesifikasi dan jumlah pakaian dinas sebelum proses pengadaan dilaksanakan; Koordinasi lebih awal dengan penyedia untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman.					
8	Pemetaan kebutuhan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi jabatan; Penetapan prioritas peserta diklat sesuai kebutuhan organisasi; Pemantauan realisasi pelaksanaan diklat agar sesuai rencana.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
9	Penentuan sasaran sosialisasi yang lebih spesifik, terutama pelaku usaha dan konsumen rokok; Penyesuaian materi sosialisasi agar mudah dipahami dan tepat sasaran; Pelaksanaan sosialisasi secara langsung di lokasi yang berpotensi terjadi peredaran rokok ilegal; Koordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat pesan dan jangkauan sosialisasi.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
10	Melakukan pengecekan dan pembaruan data persediaan secara rutin, menetapkan stok minimum komponen instalasi listrik, serta merencanakan pengadaan lebih awal untuk mencegah kekurangan persediaan.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
11	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan, melakukan koordinasi lebih awal dengan pihak terkait, serta memastikan kesesuaian spesifikasi sebelum proses pengadaan dilaksanakan.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
12	Melakukan inventarisasi dan monitoring persediaan secara rutin, menetapkan stok minimum bahan logistik kantor, serta	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
	merencanakan pengadaan secara tepat waktu sesuai kebutuhan.					
13	Meningkatkan koordinasi dan kesiapan petugas, melengkapi sarana pendukung pelayanan tamu, serta melakukan evaluasi pelayanan secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
14	Menyusun jadwal rapat secara lebih terencana dan terkoordinasi, memperkuat komunikasi antar SKPD, serta melakukan evaluasi pelaksanaan rapat untuk meningkatkan efektivitas hasil rapat.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
15	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis kendaraan dinas, memperkuat pengawasan proses pengadaan, serta melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pengadaan secara berkala.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
16	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis, memperkuat pengawasan dan monitoring proses pengadaan, serta melakukan evaluasi hasil pengadaan agar sesuai dengan kebutuhan dan jadwal.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
17	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis, memperkuat pengawasan dan monitoring pelaksanaan pengadaan, serta melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian hasil pengadaan dengan kebutuhan.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
18	Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan dan dokumen teknis, memperkuat pengawasan	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
	dan monitoring proses pengadaan, serta melakukan evaluasi pelaksanaan secara berkala agar pengadaan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.					
19	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan penyedia layanan, melakukan monitoring layanan secara berkala, serta menyiapkan langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap operasional.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
20	Meningkatkan pengawasan dan penjadwalan pemeliharaan kendaraan dinas secara berkala, memperjelas tanggung jawab pengguna, serta melakukan evaluasi kondisi kendaraan untuk menjaga kelayakan operasional.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
21	Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan secara berkala, meningkatkan pengawasan penggunaan kendaraan, serta merencanakan perbaikan atau penggantian kendaraan agar mendukung kelancaran operasional.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
22	Melakukan inventarisasi dan pengecekan kondisi peralatan kantor secara berkala, meningkatkan kedisiplinan penggunaan, serta merencanakan pemeliharaan atau penggantian peralatan agar mendukung kelancaran kerja.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
23	Meningkatkan kualitas perencanaan teknis dan jadwal pekerjaan, memperkuat pengawasan dan monitoring pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi, serta melakukan evaluasi	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
	hasil pekerjaan secara berkala untuk memastikan efektivitas.					
24	Melakukan pendataan dan penilaian kondisi sarana dan prasarana secara menyeluruh, menyusun skala prioritas pemeliharaan, serta mengusulkan penganggaran secara lebih tepat dan berkelanjutan.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
25	Monitoring bersama tim dari tingkat lebih atas yaitu provinsi atau pusat	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II 2026		
26	Monitoring dan evaluasi bersama pemangku kepentingan dan menambah jumlah titik sasaran kunjungan lapangan	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Tahun 2026		
27	Penyusunan target waktu (timeline) fasilitasi penyusunan produk hukum yang disepakati bersama OPD pengusul; Monitoring dan evaluasi proses fasilitasi penyusunan produk hukum, termasuk pencatatan tahapan dan kendala yang dihadapi selama proses berlangsung.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan III 2026		
28	Monitoring kegiatan bersama pemangku kegiatan terkait	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan IV 2026		
29	Pembentukan Penyusunan Key Performance Indicators (KPI) Terpadu, Agenda Sinkronisasi Terjadwal, dan Peningkatan Kompetensi Analis	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan IV 2026		
30	Penyusunan jadwal kunjungan ke lapangan dalam rangka monev fisik pembangunan secara berkelanjutan.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan II Tahun 2026		
31	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dan berkala.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan III 2026		
	Menyusun jadwal pelaksanaan tender	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan I 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
32	Melakukan koordinasi dengan PPK agar dokumen persiapan pengadaan segera dikirim Ke Bagian PBJ sehingga dapat dilakukan tender.	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan III 2026		
33	Monitoring jadwal pemilihan secara rinci pada setiap tahapan yang harus dilalui	Konfirmasi pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Triwulan III 2026		

B. Evaluasi Terpisah

Pemantauan lainnya adalah berupa evaluasi terpisah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, yaitu dengan melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit unit kerja strategis. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

C. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut pemantauan dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP. Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil rekomendasi dari auditor eksternal maupun internal yang telah melakukan audit/evaluasi/reviu.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

LAMPIRAN

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah																					
Tahun Penilaian	: 2026																					
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029																					
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																					
OPD yang Dinilai	: Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo																					
Sumber Data	Renstra Sekretariat Daerah																					
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien																					
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Meningkatnya Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah 																					
IKU Renstra OPD	IKU																					
		2026																				
	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76																				
	2. Indeks Reformasi Hukum	85,7																				
	3. Indeks Tata Kelola Pengadaan	79																				
Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Program Perekonomian dan Pembangunan 																					
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<table border="0"> <tr> <td>Tujuan Strategis</td> <td>: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien</td> </tr> <tr> <td>1. Sasaran Strategis</td> <td>: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</td> </tr> <tr> <td>IKU Strategis</td> <td>: Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td> </tr> <tr> <td>Program</td> <td>: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td> </tr> <tr> <td>2. Sasaran Strategis</td> <td>: Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</td> </tr> <tr> <td>IKU Strategis</td> <td>: Indeks Reformasi Hukum</td> </tr> <tr> <td>Program</td> <td>: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</td> </tr> <tr> <td>3. Sasaran Strategis</td> <td>: Meningkatnya Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah</td> </tr> <tr> <td>IKU Strategis</td> <td>: Indeks Tata Kelola Pengadaan</td> </tr> <tr> <td>Program</td> <td>: Program Perekonomian dan Pembangunan</td> </tr> </table>		Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1. Sasaran Strategis	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	IKU Strategis	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2. Sasaran Strategis	: Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	IKU Strategis	: Indeks Reformasi Hukum	Program	: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3. Sasaran Strategis	: Meningkatnya Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah	IKU Strategis	: Indeks Tata Kelola Pengadaan	Program	: Program Perekonomian dan Pembangunan
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien																					
1. Sasaran Strategis	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																					
IKU Strategis	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah																					
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
2. Sasaran Strategis	: Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																					
IKU Strategis	: Indeks Reformasi Hukum																					
Program	: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																					
3. Sasaran Strategis	: Meningkatnya Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah																					
IKU Strategis	: Indeks Tata Kelola Pengadaan																					
Program	: Program Perekonomian dan Pembangunan																					

Sukoharjo, Desember 2025
Sekretaris Daerah


Abdul Haris Widodo

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah	
Tahun Penilaian	: 2026	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025 - 2029	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	: Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	
Sumber Data	Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026	
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	
Program Sekretariat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	3. Program Perekonomian dan Pembangunan	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Kegiatan:	
	1 Penataan organisasi	
	2 Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	
	3 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	10 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	11 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
	Keluaran/ Hasil Kegiatan:	
	1 Cakupan Pelaksanaan Penataan Organisasi	100%
	2 Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Administrasi Pimpinan	100%
	3 Tingkat Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
	4 Tingkat Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	5 Tingkat Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
	6 Tingkat Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	7 Tingkat Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	8 Tingkat Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	9 Tingkat Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	10 Tingkat Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%
	11 Tingkat Capaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah	100%
	B. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Kegiatan:	
	1 Administrasi Tata Pemerintahan	
	2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
	3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
	4 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
	Keluaran/ Hasil Kegiatan:	
	1 Cakupan Pelaksanaan Tata Administrasi Pemerintahan	100%
2 Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	
3 Cakupan Penyusunan Produk dan Pelayanan Hukum	100%	
4 Cakupan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100%	
C. Program Perekonomian dan Pembangunan		
Kegiatan:		
1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		

	2 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
	3 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
	4 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	Keluaran/ Hasil Kegiatan:	
	1 Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang Dimplemaentasikan	100%
	2 Prosentase Pemantauan Kebijakan Kebijakan SDA yang Dimplemaentasikan	100%
	3 Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%
	4 Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Sda.	

Sukoharjo, Desember 2025
Sekretaris Daerah



Abdul Haris Widodo

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Risiko		Pemilik	Sebab		Sumber	C/UC	Dampak	
				Kode Risiko	e		Uraian	g			Uraian	j
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
3	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Terjadi keterlambatan penyelesaian Program dan Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan serta keterlambatan dan ketidaktepatan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa.	RSO.26.33.02.03	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	- Pelaporan monitoring dan evaluasi kegiatan Perangkat Daerah belum tepat waktu, mutu, dan sasaran. - Kurangnya SDM sesuai kualifikasi dan kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa - Koordinasi kebijakan perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas BUMD, BLUD, dan OPD terkait masih rendah	Internal	C	Capaian target pembangunan daerah tertunda, program prioritas tidak terlaksana sesuai jadwal, dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja pembangunan menurun.	- Sekretariat Daerah, - Perangkat Daerah		
	Program Perencanaan dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perencanaan dan SDA										
		Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan										
		Tingkat Kematangan UKPBJ										

Sukoharjo, Desember 2025
Sekretaris Daerah

Abdul Hans Widodo

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Penilaian : 2026 Periode yang dinilai : Periode RPJMD 2025 - 2029 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Sasaran strategis OPD : 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 2. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Meningkatkan Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan														
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/ UC	Dampak**)				
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
1	Kegiatan Penataan organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pelaksanaan	Terjadinya tumpang tindih kewenangan dan tugas fungsi sehingga organisasi perangkat daerah kurang efektif	ROO.26.33.03.01	Kepala Bagian Organisasi	Perangkat Daerah kurang memahami tugas dan fungsi	Internal	C	Terdapat urusan pemerintahan yang tidak tertangani	Seluruh Perangkat Daerah			
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pelaksanaan	Penyusunan dokumen ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak tepat waktu	ROO.26.33.03.02	Kepala Bagian Organisasi	Penyusunan peta proses bisnis membutuhkan koordinasi lintas OPD dan membutuhkan waktu yang lama	Eksternal	C	Proses Bisnis Kabupaten Sukoharjo dan Perangkat Daerah tidak segera tersusun	Seluruh Perangkat Daerah			
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pelaporan	Pengisian realisasi rencana aksi RB tidak tepat waktu	ROO.26.33.03.03	Kepala Bagian Organisasi	Keterlambatan OPD dalam menyampaikan data dan informasi	Internal	C	Pelaporan pada portal RB tidak menggunakan data terkini sehingga dapat mempengaruhi indeks Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah			
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pelaksanaan	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak selesai tepat waktu.	ROO.26.33.03.04	Kepala Bagian Organisasi	Keterlambatan Perangkat Daerah dalam mengumpulkan laporan SKM Perangkat Daerah.	Eksternal	C	Laporan tidak terselesaikan tepat waktu dan pengumpulan laporan SKM kepada Kementerian PANRB melebihi batas waktu yang ditentukan	Seluruh Perangkat Daerah			
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Pelaporan	LKIP Kabupaten tidak tepat waktu.	ROO.26.33.03.05	Kepala Bagian Organisasi	Keterlambatan OPD dalam menyampaikan data dan informasi.	Internal	C	Dokumen tidak terselesaikan tepat waktu dan dapat mempengaruhi nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Seluruh Perangkat Daerah			
2 Kegiatan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan														
1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Pelaksanaan	Fasilitasi keprotokolan tidak berjalan secara optimal.	ROO.26.33.03.06	Kepala Bagian Prokoptim	Kurangnya koordinasi antara penyelenggara acara dengan protokol, kesiapan panitia dalam menyelenggarakan kegiatan, dan perubahan acara yang mendadak.	Internal	C	Acara tidak berjalan tertib dan sesuai tata protokol dan Merunnya citra profesionalisme Pemerintah Daerah.	- Kepala Daerah - Seluruh Perangkat Daerah - Masyarakat			
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan	Fasilitasi komunikasi pimpinan/branding media massa kurang optimal.	ROO.26.33.03.07	Kepala Bagian Prokoptim	SDM kurang memadai; alat/sarpras pendukung kurang memadai.	Internal	C	Kinerja dan Publikasi belum optimal	Kepala Daerah			

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
3.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pelaksanaan	Kegiatan pimpinan tidak terdokumentasi dan mengalami keterlambatan publikasi.	ROO.26.33.03.08	Kepala Bagian Prokopim	Serpras dokumentasi dan publikasi tidak memadai.	Internal	C	Kepercayaan masyarakat menurun	Kepala Daerah
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	ROO.26.33.03.09	Kepala Bagian Umum	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan antar unit belum optimal. - Data dan informasi pendukung perencanaan tidak tersedia tepat waktu. - Proses konsolidasi dan reviu dokumen perencanaan belum efektif.	Internal	C	- Dokumen perencanaan Perangkat Daerah tidak tersusun tepat waktu atau kurang berkualitas. - Pelaksanaan program dan kegiatan tidak memiliki dasar perencanaan yang memadai. - Pencapaian sasaran Perangkat Daerah tidak optimal.	Perangkat Daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	ROO.26.33.03.10	Kepala Bagian Umum	- Koordinasi penyusunan RKA-SKPD belum berjalan efektif. - Sinkronisasi RKA-SKPD dengan dokumen perencanaan belum optimal. - Proses verifikasi dan pembahasan RKA-SKPD tidak tepat waktu.	Internal	C	- Dokumen RKA-SKPD tidak sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang ditetapkan. - Proses penetapan anggaran Perangkat Daerah terhambat. - Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terganggu.	Perangkat Daerah
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ROO.26.33.03.11	Kepala Bagian Umum	- Penyesuaian perubahan kebijakan dan prioritas belum terkoordinasi dengan baik. - Data perubahan kebutuhan anggaran tidak tersedia tepat waktu. - Proses pembahasan dan penelaahan perubahan RKA-SKPD belum efektif.	Internal	C	- Dokumen Perubahan RKA-SKPD tidak tersusun tepat waktu atau kurang akurat. - Penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhambat. - Kinerja Perangkat Daerah tidak optimal.	Perangkat Daerah
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan penetapan Dokumen DPA-SKPD.	ROO.26.33.03.12	Kepala Bagian Umum	- Proses finalisasi dan verifikasi dokumen belum berjalan optimal. - Koordinasi antar unit terkait penetapan DPA-SKPD kurang efektif. - Penyampaian dokumen pendukung tidak tepat waktu.	Internal	C	- Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah tertunda. - Penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. - Kinerja Perangkat Daerah terganggu.	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C/ UC	Dampak**)	Pihak yang Terkena
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan penetapan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	ROO.26.33.03.13	Kepala Bagian Umum	Proses penyesuaian perubahan anggaran belum terkoordinasi dengan baik. - Keterlambatan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. - Proses verifikasi dan penetapan perubahan DPA-SKPD belum efektif.	Internal	C	- Pelaksanaan perubahan program dan kegiatan tidak dapat segera dilaksanakan. - Penyesuaian penggunaan anggaran Perangkat Daerah terhambat. - Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan menurun.	Perangkat Daerah	
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan pelaksanaan atau ketidaktepatan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	ROO.26.33.03.14	Kepala Bagian Umum	Pengumpulan dan pengolahan data kinerja belum optimal. - Koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja antar unit kurang efektif. - Mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja belum berjalan baik.	Internal	C	- Hasil evaluasi kinerja tidak tersedia tepat waktu atau kurang akurat - Pengambilan keputusan perbaikan kinerja menjadi terhambat. - Peningkatan kinerja Perangkat Daerah tidak optimal.	Perangkat Daerah	
4	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan/tertundanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.26.33.03.15	Kepala Bagian Umum	Perubahan kebijakan gaji dan tunjangan ASN	Eksternal	UC	Hak ASN tertunda/ layanan administrasi kepegawaian terganggu	ASN Sekretariat Daerah	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Perencanaan	Terjadinya kesalahan atau keterlambatan penatausahaan serta pengujian/verifikasi keuangan SKPD.	ROO.26.33.03.16	Kepala Bagian Umum	Belum lengkapnya lampiran pendukung dokumen spj penatausahaan	Internal	C	Terhambatnya pencairan GU	Perangkat Daerah	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	ROO.26.33.03.17	Kepala Bagian Umum	Pengumpulan dan konsolidasi data transaksi keuangan dari unit kerja belum tepat waktu. - Proses penatausahaan dan rekonsiliasi keuangan belum berjalan optimal. - Koordinasi penyusunan laporan keuangan antar unit terkait belum efektif.	Internal	C	- Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tidak tersusun tepat waktu atau kurang akurat. - Proses evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah terhambat. - Pengambilan keputusan manajerial terkait kinerja keuangan menjadi terganggu.	Perangkat Daerah	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.	ROO.26.33.03.18	Kepala Bagian Umum	Penatausahaan dan pencatatan transaksi keuangan belum tertib. - Pengumpulan data laporan keuangan periodik tidak tepat waktu. - Mekanisme verifikasi dan pelaporan keuangan periodik belum berjalan efektif.	Internal	C	- Laporan keuangan periodik tidak tersedia tepat waktu atau kurang andal. - Pemantauan dan pengendalian realisasi anggaran tidak optimal. - Pengambilan keputusan pengelolaan keuangan menjadi kurang tepat.	Perangkat Daerah	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab ^{*)}			Dampak ^{**)}					
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
5.	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bahan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan	Terjadinya ketidaktepatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.	ROO.26.33.03.19	Kepala Bagian Umum	h	- Data realisasi anggaran tidak terhimpun secara akurat dan tepat waktu. - Metode analisis prognosis realisasi anggaran belum diterapkan secara konsisten. - Koordinasi penyusunan pelaporan dan analisis anggaran belum optimal	Internal	C	k	- Prognosis realisasi anggaran tidak mencerminkan kondisi riil pelaksanaan anggaran. - Pengendalian dan penyesuaian pelaksanaan anggaran menjadi kurang tepat. - Kinerja pengelolaan anggaran Perangkat Daerah tidak optimal.	Perangkat Daerah	
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	ROO.26.33.03.20	Kepala Bagian Umum	g	- Perencanaan kebutuhan pakaian dinas dan atribut belum disusun secara akurat. - Koordinasi pelaksanaan pengadaan belum berjalan optimal. - Proses verifikasi spesifikasi dan jumlah kebutuhan belum efektif.	Internal	C			- Pakaian dinas dan atribut tidak tersedia tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan. - Pelaksanaan tugas kedinasan ASN tidak didukung secara optimal. - Keterlambatan dan keseragaman aparaturnya dalam pelaksanaan tugas terganggu.	ASN Sekretariat Daerah
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pengumpulan	Terjadinya ketidaktepatan atau keterlambatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.	ROO.26.33.03.21	Kepala Bagian Umum		- Pengumpulan dan pemutakhiran data kepegawaian belum berjalan tertib. - Sistem pengelolaan data kepegawaian belum dimanfaatkan secara optimal. - Koordinasi antar unit dalam penyampaian data kepegawaian belum efektif.	Internal	C			- Data dan dokumen administrasi kepegawaian tidak akurat atau tidak mutakhir. - Pelayanan administrasi kepegawaian kepada ASN terganggu. - Pengambilan keputusan kepegawaian menjadi kurang tepat.	Perangkat Daerah
3.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaporan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai.	ROO.26.33.03.22	Kepala Bagian Umum		- Perencanaan dan penjadwalan monitoring serta evaluasi kinerja belum optimal. - Data kinerja pegawai tidak tersedia secara lengkap dan tepat waktu. - Mekanisme penilaian kinerja belum diterapkan secara konsisten.	Internal	C			- Hasil penilaian kinerja pegawai tidak tersedia tepat waktu atau kurang akurat. - Upaya pembinaan dan peningkatan kinerja pegawai terhambat. - Kinerja organisasi Perangkat Daerah tidak optimal.	- ASN Sekretariat Daerah - Pimpinan unit kerja
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan	Tidak terpenuhinya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	ROO.26.33.03.23	Kepala Bagian Umum		Tidak tersampainya informasi undangan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Internal	C			Tidak meningkatnya kompetensi ASN Sekretariat Daerah	ASN Sekretariat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	c Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	d Pelaksanaan	e Belum optimalnya sasaran sosialisasi kepada masyarakat terutama penjual dan pembeli Rokok ilegal (tidak berpita Cukai resmi)	f ROO.26.33.03.24	g Kepala Bagian Umum	h Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan minimnya informasi untuk membeli rokok yang berpita Cukai resmi	i Eksternal	j C	k Tidak Optimalnya penggunaan Rokok di masyarakat secara Legal	l - Perangkat Daerah - Masyarakat	
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan	Persediaan komponen intalasi listrik kurang	ROO.26.33.03.25	Kepala Bagian Umum	Kebutuhan komponen instalasi listrik tidak direncanakan dengan baik	Internal	C	Persediaan komponen instalasi listrik tidak sesuai dengan kebutuhan, pelayanan tidak maksimal	Perangkat Daerah	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan	ATK kurang tersedia	ROO.26.33.03.26	Kepala Bagian Umum	Kebutuhan ATK tidak direncanakan dengan baik	Internal	C	Persediaan ATK tidak sesuai kebutuhan, pelayanan tidak maksimal	Perangkat Daerah	
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan peralatan rumah tangga.	ROO.26.33.03.27	Kepala Bagian Umum	- Perencanaan kebutuhan peralatan rumah tangga belum disusun secara akurat. - Koordinasi pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga belum optimal. - Proses verifikasi spesifikasi dan jumlah kebutuhan belum berjalan efektif.	Internal	C	- Peralatan rumah tangga tidak tersedia tepat waktu atau tidak sesuai kebutuhan. - Dukungan fasilitas operasional kantor menjadi terganggu. - Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah menurun.	Perangkat Daerah	
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik Kantor	Pelaksanaan	Kekurangan persediaan Bahan logistik kantor	ROO.26.33.03.28	Kepala Bagian Umum	Penambahan jumlah pegawai dan efisiensi anggaran	Internal	C	Pelayanan internal/perkantoran tidak maksimal	Perangkat Daerah	
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan	Permintaan barang cetakan tidak sesuai dengan rencana	ROO.26.33.03.29	Kepala Bagian Umum	Menyesuaikan perkembangan kebutuhan pimpinan	Internal	UC	Pelayanan tidak maksimal	Perangkat Daerah	
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Komponen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Kenaikan harga surat kabar, surat kabar/ majalah yang dibutuhkan tidak sesuai	ROO.26.33.03.30	Kepala Bagian Umum	Kenaikan harga secara global	Eksternal	UC	Kebutuhan tidak terpenuhi	Perangkat Daerah	
	7. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Pelaksanaan	Tidak optimalnya pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah	ROO.26.33.03.31	Kepala Bagian Umum	Kegiatan/acara kunjungan tamu KDH/ WKDH/ Sekretariat Daerah tidak dapat diperkirakan jumlah dan waktunya	Eksternal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan makan minum KDH/WKDH, rapat dan kunjungan tamu pemerintah daerah	Perangkat Daerah	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/ UC	Dampak**)	Pihak yang Terkena
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber			
a	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Kebutuhan Dalam Koordinasi dan Konsultasi	d	e	f	g	h	i	k	l	
			Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidakterlaksanaan, atau ketidakefektifan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	ROO.26.33.03.32	Kepala Bagian Umum	- Perencanaan dan penjadwalan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD belum disusun secara optimal. - Koordinasi antar SKPD dan unit terkait dalam penyelenggaraan rapat belum berjalan efektif. - Dukungan administrasi dan teknis penyelenggaraan rapat belum memadai.	Internal	- Proses koordinasi dan konsultasi antar SKPD tidak berjalan optimal. - Penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan antar SKPD menjadi terhambat. - Informasi dan keputusan hasil rapat tidak tersampaikan secara efektif.	- Perangkat Daerah (SKPD) terkait. - Pimpinan Perangkat Daerah.	
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau ketidaktepatan pengadaan kendaraan dinas.	ROO.26.33.03.33	Kepala Bagian Umum	- Penetapan spesifikasi teknis kendaraan dinas belum dirumuskan secara jelas. - Proses pengadaan dan verifikasi hasil pengadaan belum berjalan efektif. - Koordinasi antara pengguna dan pengelola pengadaan kurang optimal.	Internal	- Kendaraan dinas tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan operasional. - Pelaksanaan tugas kedinasan menjadi kurang efektif.	Perangkat Daerah	
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan peralatan dan mesin lainnya.	ROO.26.33.03.34	Kepala Bagian Umum	- Perencanaan kebutuhan peralatan dan mesin belum akurat. - Proses pengadaan dan penerimaan barang belum tertib.	Internal	- Peralatan dan mesin tidak mendukung kelancaran operasional Perangkat Daerah. - Efektivitas pelaksanaan tugas teknis menurun.	Perangkat Daerah	
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.35	Kepala Bagian Umum	- Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana belum disusun secara komprehensif. - Koordinasi pelaksanaan pengadaan belum optimal. - Proses pengawasan pelaksanaan pengadaan kurang efektif.	Internal	- Sarana dan prasarana gedung tidak mendukung aktivitas perkantoran secara optimal. - Kenyamanan dan kelancaran kerja terganggu.	Perangkat Daerah	
	4. Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidaktepatan pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.36	Kepala Bagian Umum	- Penetapan kebutuhan dan spesifikasi gedung belum tepat. - Proses pengadaan dan penetapan hasil pengadaan memerlukan waktu lebih lama.	Internal	- Pemanfaatan gedung kantor tidak sesuai rencana. - Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terganggu.	Perangkat Daerah	
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Informasi Kepada SKPD dan Pemerintah Atasannya	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidaktepatan, atau gangguan penyediaan jasa surat menyurat.	ROO.26.33.03.37	Kepala Bagian Umum	- Pengelolaan jasa surat menyurat belum tertib. - Koordinasi penyediaan layanan belum efektif.	Internal	- Penyampaian dokumen dan informasi resmi menjadi terhambat. - Proses administrasi dan pengambilan keputusan terganggu.	Perangkat Daerah	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*			C/UC	Dampak**	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber			Uraian
a	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	Pelaksanaan	Terjadinya gangguan, keterlambatan, atau ketidaktersediaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	ROO.26.33.03.38	Kepala Bagian Umum	h - Pengelolaan dan pengawasan penyediaan layanan utilitas belum optimal. - Ketergantungan pada pihak penyedia jasa eksternal.	i Internal	C	k - Aktivitas perkantoran dan layanan pemerintahan terganggu. - Pelaksanaan tugas ASN tidak berjalan normal.	Perangkat Daerah
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktersediaan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	ROO.26.33.03.39	Kepala Bagian Umum	h - Perencanaan kebutuhan perlengkapan kantor belum akurat. - Proses penyediaan dan distribusi belum berjalan tertib.	Internal	C	- Ketersediaan perlengkapan kerja tidak mendukung aktivitas kantor. - Produktivitas kerja ASN menurun.	Perangkat Daerah
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidaklaksanaan, atau tidak efektifnya penyediaan jasa pelayanan umum kantor.	ROO.26.33.03.40	Kepala Bagian Umum	h - Pengelolaan jasa pelayanan umum belum terkoordinasi dengan baik. - Pengawasan pelaksanaan jasa belum optimal.	Internal	C	- Kenyamanan dan kelancaran operasional kantor terganggu. - Lingkungan kerja menjadi kurang kondusif.	Perangkat Daerah
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mobil Jabatan	Pelaksanaan	Kendaraan dinas jabatan tidak terpelihara	ROO.26.33.03.41	Kepala Bagian Umum	h Usia kendaraan operasional dinas banyak sudah diatas 10 tahun	Internal	C	Kendaraan dinas jabatan rusak	Perangkat Daerah
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Pelaksanaan	Kendaraan dinas operasional atau lapangan rusak parah	ROO.26.33.03.42	Kepala Bagian Umum	h Belum tersusun jadwal pemeliharaan berdasarkan skala prioritas	Internal	C	Mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan membengkaknya biaya perawatan kendaraan dinas	Perangkat Daerah
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan	Peralatan Kantor banyak yang rusak	ROO.26.33.03.43	Kepala Bagian Umum	h Belum tersusun jadwal pemeliharaan berdasarkan skala prioritas	Internal	C	Menghambat kelancaraan dalam bekerja	Perangkat Daerah
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian, atau tidak efektifnya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.44	Kepala Bagian Umum	h Belum tersusun jadwal pemeliharaan berdasarkan skala prioritas	Internal	C	Menghambat kelancaraan dalam bekerja	Perangkat Daerah
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan	Belum terakomodirnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor secara memadai	ROO.26.33.03.45	Kepala Bagian Umum	h Banyaknya sarana dan prasarana gedung yang kurang layak dan besarnya biaya pemeliharaan gedung bertingkat	Internal	C	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
10	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.33.03.46	Kepala Bagian Umum	- Proses administrasi pembayaran belum berjalan tepat waktu. - Verifikasi dokumen pembayaran belum tertib.	Internal	C	- Pembayaran hak keuangan pimpinan tidak dilakukan sesuai jadwal atau ketentuan. - Tertib administrasi keuangan terganggu. - Medical check up tidak dilaksanakan tepat waktu atau tidak terlaksana. - Pemantauan kondisi kesehatan pimpinan tidak optimal.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidakterlaksanaan pelaksanaan medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.33.03.47	Kepala Bagian Umum	- Perencanaan dan penjadwalan medical check up belum optimal. - Koordinasi pelaksanaan dengan pihak terkait belum efektif.	Internal	C	- Perencanaan dinas dan atribut pakaian tidak akurat. - Proses penyediaan dan verifikasi spesifikasi belum efektif.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3.	Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.33.03.48	Kepala Bagian Umum	- Perencanaan kebutuhan pakaian dinas dan atribut belum akurat.	Internal	C	- Pakaian dinas dan atribut tidak tersedia tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan. - Dukungan perlengkapan kedinasan pimpinan tidak optimal.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										
1.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pelaksanaan	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tidak sesuai	ROO.26.33.03.49	Kepala Bagian Umum	Kenaikan harga barang kebutuhan pokok	Eksternal	UC	Kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tidak optimal	Kepala Daerah
2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tidak sesuai	ROO.26.33.03.50	Kepala Bagian Umum	Kenaikan harga barang kebutuhan pokok	Eksternal	UC	Kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tidak optimal	Wakil Kepala Daerah
3.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pelaksanaan	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah tidak sesuai	ROO.26.33.03.51	Kepala Bagian Umum	Kenaikan harga barang kebutuhan pokok	Eksternal	UC	Kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah tidak optimal	Sekretaris Daerah
II	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat										
1.	Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah dokumen penataan administrasi pemerintahan	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penataan administrasi pemerintahan.	ROO.26.33.03.52	Kepala Bagian Pemerintahan	Peraturan perundang-undangan yang berubah membutuhkan penyesuaian pelaksanaan di daerah	Eksternal	UC	Setiap peraturan pusat yang terbit membutuhkan peraturan pelaksanaan yang dalam penyusunannya membutuhkan waktu, sarana dan prasarana dan kompetensi SDM untuk memahami	- Perangkat Daerah - Masyarakat - Pihak ketiga

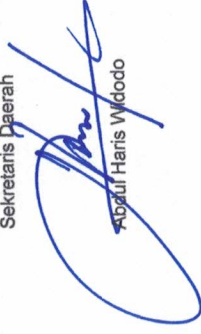
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	2. Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan pengelolaan administrasi kewilayahan.	ROO.26.33.03.53	Kepala Bagian Pemerintahan	h - Data dan informasi administrasi kewilayahan belum terhimpun dan dimutakhirkan secara konsisten. - Koordinasi antara Perangkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa belum berjalan optimal. - Prosedur pengelolaan administrasi kewilayahan belum diterapkan secara tertib dan seragam.	i Eksternal	C	k - Informasi administrasi kewilayahan tidak akurat atau tidak tersedia tepat waktu. - Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah menjadi kurang efektif. - Pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan kewilayahan menjadi kurang tepat.	l - Perangkat Daerah. - Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/ Desa. - Pimpinan Daerah.
3.	Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Pelaksanaan	Terjadinya ketidakefektifan atau keterlambatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.	ROO.26.33.03.54	Kepala Bagian Pemerintahan	OPD terlambat dalam penyampaian data dukung	Eksternal	C	Kinerja ASN kurang	Perangkat Daerah
2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat											
	1. Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidaktepatan, atau ketidakefektifan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	ROO.26.33.03.55	Kepala Bagian Kesra	h - Penetapan Kuota Jamaah Haji yang dinamis/berubah setiap tahun - Keterbatasan Sumber daya manusia di bidang keagamaan - Kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait	Internal, Eksternal	C	Peran fasilitasi kepada jamaah haji yang kurang optimal - Fasilitas Kegiatan Keagamaan yang kurang Optimal	Perangkat Daerah, Masyarakat
	2. Evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan serta pengukuran capaian kinerja kesejahteraan sosial.	ROO.26.33.03.56	Kepala Bagian Kesra	h - Keterbatasan Sumber Daya - Monitoring dan Evaluasi yang belum berjalan optimal - Penyebaran Informasi kepada masyarakat yang kurang optimal	Internal, Eksternal	C	Meningkatnya risiko penyimpangan penggunaan bantuan yang mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran - Program Kegiatan tidak berjalan optimal	Perangkat Daerah, Masyarakat
	3. Evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan serta pengukuran capaian kinerja kesejahteraan masyarakat.	ROO.26.33.03.57	Kepala Bagian Kesra	h - Sosialisasi dan Informasi Terkait Bantuan Kegiatan bagi Kelompok Masyarakat yang kurang optimal	Internal, Eksternal	C	Bantuan Kegiatan yang diberikan tidak merata ke seluruh kelompok masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat
3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											
	1. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.	ROO.26.33.03.58	Kepala Bagian Hukum	h - Keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang kompeten. - Koordinasi yang kurang efektif dengan instansi terkait.	Internal, Eksternal	C	Proses legislasi dan regulasi menjadi tertunda. - Kredibilitas pemerintah daerah dapat menurun.	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidakefektifan fasilitasi bantuan hukum.	ROO.26.33.03.59	Kepala Bagian Hukum	h - Kompleksitas kasus hukum yang melibatkan banyak pihak. - Keterbatasan akses terhadap dokumen pendukung	Internal, Eksternal	UC	Proses penyelesaian kasus menjadi terhambat. - Risiko keputusan hukum yang kurang maksimal.	Perangkat Daerah - Masyarakat atau pihak yang dilayani

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*			Dampak**	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	3. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	c Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	d Pelaksanaan	e Terjadinya ketidaktepatan, keterlambatan, atau ketidakterpaduan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum.	f ROO.26.33.03.60	g Kepala Bagian Hukum	h Infrastruktur TI yang tidak memadai (jaringan lambat, perangkat tua). Ketergantungan pada pihak ketiga tanpa kontrol optimal.	i Internal, Eksternal	j C	k - Proses digitalisasi dokumen terhambat. - Potensi kesalahan atau kehilangan data yang sensitif.	l Seluruh Perangkat Daerah
4	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah										
	1. Fasilitasi kerja sama dalam negeri	jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan, ketidaktepatan, atau ketidakefektifan fasilitasi kerja sama dalam negeri.	ROO.26.33.03.61	Kepala Bagian Pemerintahan	Keterlambatan dalam penyampaian data dukung	Eksternal	C	Kinerja ASN kurang	Perangkat Daerah
	2. Evaluasi pelaksanaan kerja sama	jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	Pelaporan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi pelaksanaan kerja sama.	ROO.26.33.03.62	Kepala Bagian Pemerintahan	Aturan kerjasama belum dipahami para pihak yang ingin melaksanakannya kerjasama	Eksternal	C	Para Pihak belum mengetahui prosedur dan sebagainya dan hanya ingin kerjasama untuk memenuhi syarat formil saja	- Perangkat Daerah, - Masyarakat, - Pihak ketiga
III	Program Perencanaan dan Pembangunan										
1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan										
	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.	ROO.26.33.03.63	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA	Belum dipahaminya regulasi terkait penatausahaan keuangan bagi BUMD dan BLUD di Kabupaten	Internal, Eksternal	C	Regulasi baru terkait penatausahaan keuangan belum dipakai	- Perangkat Daerah pengampu urusan perekonomian - BUMD dan BLUD
	2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan pengendalian dan distribusi perekonomian.	ROO.26.33.03.64	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA	Koordinasi pengendalian distribusi antar Perangkat Daerah belum berjalan optimal. Data dan informasi distribusi perekonomian belum akurat atau tidak mutakhir.	Internal, Eksternal	C	- Pengendalian dan distribusi perekonomian tidak berjalan sesuai kebijakan yang ditetapkan. - Ketidakeimbangan distribusi dapat terjadi pada wilayah atau sektor tertentu. - Kinerja perekonomian daerah menjadi kurang stabil.	- Perangkat Daerah pengampu urusan perekonomian, - Pelaku usaha dan masyarakat
	3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.	ROO.26.33.03.65	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA	Data pelaku ekonomi mikro kecil belum terhimpun secara lengkap. Koordinasi perencanaan dan pengawasan antar unit terkait belum optimal. Mekanisme pengawasan kegiatan ekonomi mikro kecil belum berjalan efektif.	Internal, Eksternal	C	- Program pembinaan dan pengembangan ekonomi mikro kecil tidak tepat sasaran. - Pengawasan kegiatan ekonomi mikro kecil tidak efektif. - Dampak kebijakan terhadap penguatan ekonomi mikro kecil menjadi terbatas	- Pelaku usaha mikro dan kecil, - Perangkat Daerah pembina ekonomi mikro kecil.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, dan perikanan	ROO.26.33.03.66	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA	- Koordinasi lintas sektor dan berjalannya kebijakan antar subsektor belum konsisten. - Mekanisme evaluasi kebijakan belum diterapkan secara optimal.	Internal, Eksternal	C	- Pelaksanaan kebijakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak terpadu. - Capaian kebijakan sektor-sektor tersebut tidak optimal. - Dampak kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku sektor menjadi terbatas.	Perangkat Daerah
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Pelaksanaan	Terjadinya , ketidaktepatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup.	ROO.26.33.03.67	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA	- Koordinasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup belum terintegrasi dengan baik. - Data dan informasi evaluasi kebijakan belum tersedia tepat waktu. - Sinkronisasi kebijakan antar Perangkat Daerah terkait belum efektif.	Internal, Eksternal	C	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Perangkat Daerah
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air.	ROO.26.33.03.68	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA	Belum semua PD yang punya gedung melaporkan penghematan energi	Internal, Eksternal	C	Data pelaporan energi se Kabupaten Sukoharjo yang belum lengkap	Perangkat Daerah
3	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Perencanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan fasilitasi penyusunan program pembangunan.	ROO.26.33.03.69	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	- Pengumpulan bahan untuk perencanaan dari bagian-bagian yang tidak tepat - Koordinasi dengan bagian-bagian kurang intensif	Eksternal	C	- Penyusunan Dokumen Perencanaan yang tepat waktu tidak dapat segera terealisasi, - Pelaksanaan kegiatan tanpa perencanaan yang matang	Perangkat Daerah
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.	ROO.26.33.03.70	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	- Jadwal monitoring belum terkoordinasi dengan baik - Keterbatasan sumber daya (manusia dan peralatan) - Kurang koordinasi antara pelaksana, pengawas, dan stakeholder	Internal	C	- Tertundanya identifikasi permasalahan di lapangan - Meningkatkan risiko penyimpangan yang tidak terdeteksi - Tumpang tindih tugas monitoring	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Risiko			Sebab*)			Dampak**)	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	C/UC	Pihak yang Terkena
a	3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pelaporan	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.	ROO.26.33.03.71	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	- Berkas pelaporan Operasional Kegiatan APBD terlambat dilengkapi oleh Perangkat Daerah - Kendala teknis pada Sistem Informasi - Adanya kekurangan Bahan / data yang diberikan dari OPD lain. - Koordinasi dengan OPD lain kurang intensif	Eksternal	C	Kesalahan dalam penyusunan laporan atau dokumen Pembangunan	Perangkat Daerah
4	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										
1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Proses pengadaan barang/jasa pemerintah di OPD belum optimal	ROO.26.33.03.72	Kepala Bagian PBJ	Pelaku pengadaan di OPD belum memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan baik	Eksternal	C	Proses pengadaan barang/jasa pada perencanaan dan persiapan terhambat dan terlambat dari jadwal RUP	Seluruh Perangkat Daerah
			Pelaksanaan	Adanya Tender gagal	ROO.26.33.03.73	Kepala Bagian PBJ	Tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan atau tidak ada yang memasukkan penawaran	Eksternal	C	Tender ulang/batal	Seluruh Perangkat Daerah
			Pelaksanaan	Dokumen persiapan pengadaan tidak lengkap	ROO.26.33.03.74	Kepala Bagian PBJ	PPK kurang memahami persyaratan dokumen yang harus dilengkapi saat mengajukan tender ke Bagian PBJ	Eksternal	C	Dokumen persiapan pengadaan dikembalikan ke PPK	Seluruh Perangkat Daerah
			Pelaksanaan	Proses pemilihan penyedia melebihi waktu yang ditetapkan	ROO.26.33.03.75	Kepala Bagian PBJ	Kurang cermatnya pokja pemilihan atau pejabat pengadaan menyusun jadwal pemilihan atau kelalaian dalam melaksanakan pemilihan sesuai jadwal	Internal	C	Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai jadwal	Seluruh Perangkat Daerah
2.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pelaksanaan	Gangguan Layanan pengadaan secara elektronik	ROO.26.33.03.76	Kepala Bagian PBJ	Akses Internet terputus; Server bermasalah; pemeliharaan; Update Sistem.	Eksternal	C	Layanan Pengadaan Secara Elektronik tidak tersedia	Seluruh Perangkat Daerah
			Pelaksanaan	Proses verifikasi penyedia yang terhambat	ROO.26.33.03.77	Kepala Bagian PBJ	Error aplikasi saat proses pendaftaran penyedia, kesalahan input data penyedia	Eksternal	C	Penyedia masih belum bisa mengaktivasi akunnya	Seluruh Perangkat Daerah
3.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Terjadinya ketidaktepatan, keterlambatan, atau ketidakefektifan pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.	ROO.26.33.03.78	Kepala Bagian PBJ	Regulasi/ aturan cepat berubah	Eksternal	C	Pelaksanaan proses PBJ tidak sesuai dengan aturan yang terbaru	Seluruh Perangkat Daerah

Sukoharjo, Desember 2025
Sekretaris Daerah



Abadi Haris Widodo

**Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Penilaian : 2026 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan*)	Skala Dampak *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
I Sasaran Strategis Sekretariat Daerah					
1	Terjadi ketidaktepatan dukungan administrasi umum dalam pelaksanaan akuntabilitas tugas pimpinan daerah.	RSO.26.33.02.01	1	3	5
2	Terjadi keterlambatan dan penurunan kualitas penyusunan produk hukum, penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.	RSO.26.33.02.02	1	3	5
3	Terjadi keterlambatan penyelesaian Program dan Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan serta keterlambatan dan ketidaktepatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.	RSO.26.33.02.03	1	3	5
II Program & Kegiatan PD					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Kegiatan Penataan organisasi					
1	Terjadinya tumpang tindih kewenangan dan tugas fungsi sehingga organisasi perangkat daerah kurang efektif	ROO.26.33.03.01	1	2	3
2	Penyusunan dokumen ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak tepat waktu	ROO.26.33.03.02	2	1	2
3	Pengisian realisasi rencana aksi RB tidak tepat waktu	ROO.26.33.03.03	2	3	11
4	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak selesai tepat waktu.	ROO.26.33.03.04	1	1	1
5	LKJIP Kabupaten tidak tepat waktu.	ROO.26.33.03.05	1	2	3
Kegiatan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan					
6	Fasilitasi keprotokolan tidak berjalan secara optimal.	ROO.26.33.03.06	4	2	12
7	Fasilitasi komunikasi pimpinan/branding media massa kurang optimal.	ROO.26.33.03.07	3	2	10
8	Kegiatan pimpinan tidak terdokumentasi dan mengalami keterlambatan publikasi.	ROO.26.33.03.08	1	2	3
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
9	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	ROO.26.33.03.09	2	2	7
10	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	ROO.26.33.03.10	1	2	3
11	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ROO.26.33.03.11	1	2	3

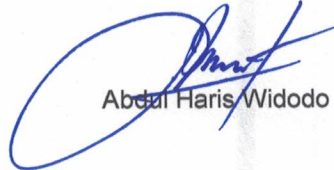
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan*)	Skala Dampak *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
12	Terjadinya keterlambatan penetapan Dokumen DPA-SKPD.	ROO.26.33.03.12	1	2	3
13	Terjadinya keterlambatan penetapan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	ROO.26.33.03.13	1	2	3
14	Terjadinya keterlambatan pelaksanaan atau ketidaktepatan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	ROO.26.33.03.14	2	3	11
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
15	Terjadinya keterlambatan/ tertundanya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.26.33.03.15	1	2	3
16	Terjadinya kesalahan atau keterlambatan penatausahaan serta pengujian/verifikasi keuangan SKPD.	ROO.26.33.03.16	2	3	11
17	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	ROO.26.33.03.17	1	3	5
18	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.	ROO.26.33.03.18	1	2	3
19	Terjadinya ketidaktepatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.	ROO.26.33.03.19	1	2	3
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
20	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	ROO.26.33.03.20	2	2	7
21	Terjadinya ketidaktepatan atau keterlambatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.	ROO.26.33.03.21	1	2	3
22	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai.	ROO.26.33.03.22	1	2	3
23	Tidak terpenuhinya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	ROO.26.33.03.23	2	2	7
24	Belum optimalnya sasaran sosialisasi kepada masyarakat terutama penjual dan pembeli Rokok Ilegal (tidak berpita Cukai resmi)	ROO.26.33.03.24	2	3	11
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
25	Persediaan komponen intalasi listrik kurang	ROO.26.33.03.25	3	3	14
26	ATK kurang tersedia	ROO.26.33.03.26	1	2	3
27	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan peralatan rumah tangga.	ROO.26.33.03.27	2	2	7
28	Kekurangan persediaan Bahan logistik kantor	ROO.26.33.03.28	2	2	7
29	Permintaan barang cetakan tidak sesuai dengan rencana	ROO.26.33.03.29	1	2	3
30	Kenaikan harga surat kabar, surat kabar/ majalah yang dibutuhkan tidak sesuai	ROO.26.33.03.30	1	2	3
31	Tidak optimalnya pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah	ROO.26.33.03.31	3	2	10
32	Terjadinya keterlambatan, ketidakterlaksanaan, atau ketidakefektifan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	ROO.26.33.03.32	2	2	7

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan*)	Skala Dampak *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
33	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau ketidaktepatan pengadaan kendaraan dinas.	ROO.26.33.03.33	2	2	7
34	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan peralatan dan mesin lainnya.	ROO.26.33.03.34	2	2	7
35	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.35	2	2	7
36	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidaktepatan pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.36	2	2	7
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
37	Terjadinya keterlambatan, ketidaktepatan, atau gangguan penyediaan jasa surat menyurat.	ROO.26.33.03.37	1	2	3
38	Terjadinya gangguan, keterlambatan, atau ketidakterpenuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	ROO.26.33.03.38	3	2	10
39	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	ROO.26.33.03.39	1	2	3
40	Terjadinya keterlambatan, ketidakterlaksanaan, atau ketidakefektifan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.	ROO.26.33.03.40	1	2	3
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
41	Kendaraan dinas jabatan tidak terpelihara	ROO.26.33.03.41	3	3	14
42	Kendaraan dinas operasional atau lapangan rusak parah	ROO.26.33.03.42	3	3	14
43	Peralatan Kantor banyak yang rusak	ROO.26.33.03.43	2	3	11
44	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidakefektifan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.44	3	3	14
45	Belum terakomodirnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor secara memadai	ROO.26.33.03.45	3	3	14
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
46	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.33.03.46	1	2	3
47	Terjadinya keterlambatan atau ketidakterlaksanaan pelaksanaan medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.33.03.47	2	3	11
48	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.33.03.48	2	3	11
Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					
49	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tidak sesuai	ROO.26.33.03.49	1	2	3
50	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tidak sesuai	ROO.26.33.03.50	1	2	3
51	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah tidak sesuai	ROO.26.33.03.51	1	2	3

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan*)	Skala Dampak *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
Kegiatan Administrasi tata pemerintahan					
52	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penataan administrasi pemerintahan.	ROO.26.33.03.52	3	1	4
53	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan pengelolaan administrasi kewilayahan.	ROO.26.33.03.53	1	3	5
54	Terjadinya ketidakefektifan atau keterlambatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.	ROO.26.33.03.54	2	2	7
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
55	Terjadinya keterlambatan, ketidakterlaksanaan, atau ketidakefektifan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	ROO.26.33.03.55	3	1	4
56	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan serta pengukuran capaian kinerja kesejahteraan sosial.	ROO.26.33.03.56	2	4	13
57	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan serta pengukuran capaian kinerja kesejahteraan masyarakat.	ROO.26.33.03.57	3	1	4
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					
58	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.	ROO.26.33.03.58	2	2	7
59	Terjadinya keterlambatan atau ketidakefektifan fasilitasi bantuan hukum.	ROO.26.33.03.59	1	2	3
60	Terjadinya ketidaktepatan, keterlambatan, atau ketidakterpaduan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum.	ROO.26.33.03.60	1	1	1
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah					
61	Terjadinya keterlambatan, ketidaktepatan, atau ketidakefektifan fasilitasi kerja sama dalam negeri.	ROO.26.33.03.61	2	2	7
62	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi pelaksanaan kerja sama.	ROO.26.33.03.62	1	2	3
Program Perekonomian dan Pembangunan					
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					
63	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.	ROO.26.33.03.63	2	3	11
64	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan pengendalian dan distribusi perekonomian.	ROO.26.33.03.64	1	3	5
65	Terjadinya ketidaktepatan atau ketidakefektifan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.	ROO.26.33.03.65	1	3	5
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					
66	Terjadinya ketidaktepatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, dan perikanan	ROO.26.33.03.66	1	3	5
67	Terjadinya , ketidaktepatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup.	ROO.26.33.03.67	1	3	5
68	Terjadinya ketidaktepatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air.	ROO.26.33.03.68	1	3	5
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					
69	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan fasilitasi penyusunan program pembangunan.	ROO.26.33.03.69	3	1	4

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan*)	Skala Dampak *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
70	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.	ROO.26.33.03.70	2	3	11
71	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.	ROO.26.33.03.71	1	2	3
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
72	Proses pengadaan barang/jasa pemerintah di OPD belum optimal	ROO.26.33.03.72	2	3	11
73	Adanya Tender gagal	ROO.26.33.03.73	1	4	8
74	Dokumen persiapan pengadaan tidak lengkap	ROO.26.33.03.74	3	2	10
75	Proses pemilihan penyedia melebihi waktu yang ditetapkan	ROO.26.33.03.75	3	3	14
76	Gangguan Layanan pengadaan secara elektronik	ROO.26.33.03.76	1	2	3
77	Proses verifikasi penyedia yang terhambat	ROO.26.33.03.77	1	2	3
78	Terjadinya ketidaktepatan, keterlambatan, atau ketidakefektifan pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.	ROO.26.33.03.78	1	2	3

Sukoharjo, Desember 2025
Sekretaris Daerah



Abdal Haris Widodo

Daftar Risiko Prioritas

Nama Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Penilaian : 2026 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis OPD						
	Nihil					
II Risiko Operasional OPD						
A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1 Kegiatan Penataan organisasi						
	Pengisian realisasi rencana aksi RB tidak tepat waktu	ROO.26.33.03.03	11	Kepala Bagian Organisasi	Keterlambatan OPD dalam menyampaikan data dan informasi	Pelaporan pada portal RB tidak menggunakan data terkini sehingga dapat mempengaruhi indeks Reformasi Birokrasi
2 Kegiatan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan						
	Fasilitasi keprotokolkan tidak berjalan secara optimal.	ROO.26.33.03.06	12	Kepala Bagian Prokopim	Belum adanya SOP teknis keprotokolkan yang baku, Kurangnya koordinasi antara penyelenggara acara dengan protokoler, kesiapan panitia dalam menyelenggarakan kegiatan, dan perubahan acara yang mendadak	Kepercayaan masyarakat menurun, Acara tidak berjalan tertib dan sesuai tata protokol.
	Fasilitasi komunikasi pimpinan/branding media massa kurang optimal.	ROO.26.33.03.07	10	Kepala Bagian Prokopim	SDM kurang memadai; alat/sarpras pendukung kurang memadai.	Kinerja tidak maksimal, Informasi kebijakan dan kegiatan pimpinan tidak tersampaikan secara luas, Citra dan branding Pemerintah Daerah kurang kuat, Capaian kinerja publikasi tidak maksimal.
3 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	ROO.26.33.03.09	7	Kepala Bagian Umum	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan antar unit belum optimal; Data dan informasi pendukung perencanaan tidak tersedia tepat waktu; Proses konsolidasi dan reviu dokumen perencanaan belum efektif.	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah tidak tersusun tepat waktu atau kurang berkualitas; Pelaksanaan program dan kegiatan tidak memiliki dasar perencanaan yang memadai; Pencapaian sasaran Perangkat Daerah tidak optimal.
	Terjadinya keterlambatan pelaksanaan atau ketidaktepatan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	ROO.26.33.03.14	11	Kepala Bagian Umum	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pelaksana evaluasi; Koordinasi antar Perangkat Daerah belum optimal; Keterlambatan penyampaian data dan dokumen pendukung; Sistem informasi kinerja belum terintegrasi optimal.	Keterlambatan pengambilan keputusan pimpinan; Ketidaktepatan penilaian capaian kinerja Perangkat Daerah; Terganggunya penyusunan laporan kinerja dan perencanaan; Menurunnya efektivitas program dan akuntabilitas kinerja.

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
4 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Terjadinya kesalahan atau keterlambatan penatausahaan serta pengujian/verifikasi keuangan SKPD.	ROO.26.33.03.16	11	Kepala Bagian Umum	Belum lengkapnya lampiran pendukung dokumen spj penatausahaan	Terhambatnya pencairan GU
5 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	ROO.26.33.03.20	7	Kepala Bagian Umum	Perencanaan kebutuhan pakaian dinas dan atribut belum disusun secara akurat; Koordinasi pelaksanaan pengadaan belum berjalan optimal; Proses verifikasi spesifikasi dan jumlah kebutuhan belum efektif.	Pakaian dinas dan atribut tidak tersedia tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan; Pelaksanaan tugas kedinasan ASN tidak didukung secara optimal; Ketertiban dan keseragaman aparatur dalam pelaksanaan tugas terganggu.
	Tidak terpenuhinya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	ROO.26.33.03.23	7	Kepala Bagian Umum	Tidak tersampainya informasi undangan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tidak meningkatnya kompetensi ASN Sekretariat Daerah
	Belum optimalnya sasaran sosialisasi kepada masyarakat terutama penjual dan pembeli Rokok Ilegal (tidak berpita Cukai resmi)	ROO.26.33.03.24	11	Kepala Bagian Umum	Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan minimnya informasi untuk membeli rokok yang berpita Cukai resmi	Tidak Optimalnya penggunaan Rokok di masyarakat secara Legal
6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Persediaan komponen instalasi listrik kurang	ROO.26.33.03.25	14	Kepala Bagian Umum	Kebutuhan komponen instalasi listrik tidak direncanakan dengan baik	Persediaan komponen instalasi listrik tidak sesuai dengan kebutuhan, pelayanan tidak maksimal
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan peralatan rumah tangga.	ROO.26.33.03.27	7	Kepala Bagian Umum	Perencanaan kebutuhan peralatan rumah tangga belum disusun secara akurat; Koordinasi pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga belum optimal; Proses verifikasi spesifikasi dan jumlah kebutuhan belum berjalan efektif.	Peralatan rumah tangga tidak tersedia tepat waktu atau tidak sesuai kebutuhan; Dukungan fasilitas operasional kantor menjadi terganggu; Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah menurun.
	Kekurangan persediaan Bahan logistik kantor	ROO.26.33.03.28	7	Kepala Bagian Umum	Penambahan jumlah pegawai dan efisiensi anggaran	Pelayanan internal/perkantoran tidak maksimal
	Tidak optimalnya pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah	ROO.26.33.03.31	10	Kepala Bagian Umum	Kegiatan/acara kunjungan tamu KDH/ WKDH/ Sekretariat Daerah tidak dapat diperkirakan jumlah dan waktunya	Tidak terpenuhinya kebutuhan makan minum KDH/WKDH, rapat dan kunjungn tamu pemerintah daerah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Terjadinya keterlambatan, ketidakterlaksanaan, atau ketidakefektifan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	ROO.26.33.03.32	7	Kepala Bagian Umum	Perencanaan dan penjadwalan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD belum disusun secara optimal; Koordinasi antar SKPD dan unit terkait dalam penyelenggaraan rapat belum berjalan efektif; Dukungan administrasi dan teknis penyelenggaraan rapat belum memadai.	Proses koordinasi dan konsultasi antar SKPD tidak berjalan optimal; Penyelarasan kebijakan, program, dan kegiatan antar SKPD menjadi terhambat; Informasi dan keputusan hasil rapat tidak tersampaikan secara efektif.
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau ketidaktepatan pengadaan kendaraan dinas.	ROO.26.33.03.33	7	Kepala Bagian Umum	Penetapan spesifikasi teknis kendaraan dinas belum dirumuskan secara jelas; Proses pengadaan dan verifikasi hasil pengadaan belum berjalan efektif; Koordinasi antara pengguna dan pengelola pengadaan kurang optimal.	Kendaraan dinas tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan operasional; Pelaksanaan tugas kedinasan menjadi kurang efektif.
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan peralatan dan mesin lainnya.	ROO.26.33.03.34	7	Kepala Bagian Umum	Perencanaan kebutuhan peralatan dan mesin belum akurat; Proses pengadaan dan penerimaan barang belum tertib.	Peralatan dan mesin tidak mendukung kelancaran operasional Perangkat Daerah; Efektivitas pelaksanaan tugas teknis menurun.
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.35	7	Kepala Bagian Umum	Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana belum disusun secara komprehensif; Koordinasi pelaksanaan pengadaan belum optimal; Proses pengawasan pelaksanaan pengadaan kurang efektif.	Sarana dan prasarana gedung tidak mendukung aktivitas perkantoran secara optimal; Kenyamanan dan kelancaran kerja terganggu.
	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidaktepatan pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.36	7	Kepala Bagian Umum	Penetapan kebutuhan dan spesifikasi gedung belum tepat; Proses pengadaan dan penetapan hasil pengadaan memerlukan waktu lebih lama.	Pemanfaatan gedung kantor tidak sesuai rencana; Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terganggu.
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Terjadinya gangguan, keterlambatan, atau ketidakterpenuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	ROO.26.33.03.38	10	Kepala Bagian Umum	Pengelolaan dan pengawasan penyediaan layanan utilitas belum optimal; Ketergantungan pada pihak penyedia jasa eksternal.	Aktivitas perkantoran dan layanan pemerintahan terganggu; Pelaksanaan tugas ASN tidak berjalan normal.

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Kendaraan dinas jabatan tidak terpelihara	ROO.26.33.03.41	14	Kepala Bagian Umum	Usia kendaraan operasional dinas banyak sudah diatas 10 tahun	Kendaraan dinas jabatan rusak
	Kendaraan dinas operasional atau lapangan rusak parah	ROO.26.33.03.42	14	Kepala Bagian Umum	Belum tersusun jadwal pemeliharaan berdasarkan skala prioritas	Mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan membengkaknya biaya perawatan kendaraan dinas
	Peralatan Kantor banyak yang rusak	ROO.26.33.03.43	11	Kepala Bagian Umum	Belum tersusun jadwal pemeliharaan berdasarkan skala prioritas	Menghambat kelancaraan dalam bekerja
	Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidakefektifan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.44	14	Kepala Bagian Umum	Belum tersusun jadwal pemeliharaan berdasarkan skala prioritas	Menghambat kelancaraan dalam bekerja
	Belum terakomodirnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor secara memadai	ROO.26.33.03.45	14	Kepala Bagian Umum	Banyaknya sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang layak dan besarnya biaya pemeliharaan gedung bertingkat	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor
10	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
	Terjadinya keterlambatan atau ketidakterlaksanaan pelaksanaan medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.33.03.47	11	Kepala Bagian Umum	Perencanaan dan penjadwalan medical check up belum optimal; Koordinasi pelaksanaan dengan pihak terkait belum efektif.	Medical check up tidak dilaksanakan tepat waktu atau tidak terlaksana; Pemantauan kondisi kesehatan pimpinan tidak optimal.
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	ROO.26.33.03.48	11	Kepala Bagian Umum	Perencanaan kebutuhan pakaian dinas dan atribut belum akurat; Proses penyediaan dan verifikasi spesifikasi belum efektif.	Pakaian dinas dan atribut tidak tersedia tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan; Dukungan perlengkapan kedinasan pimpinan tidak optimal.
11	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					
	Nihil					
B	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
1	Kegiatan Administrasi tata pemerintahan					
	Terjadinya ketidakefektifan atau keterlambatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.	ROO.26.33.03.54	7	Kepala Bagian Pemerintahan	OPD terlambat dalam penyampaian data dukung	Kinerja ASN kurang
2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan serta pengukuran capaian kinerja kesejahteraan sosial.	ROO.26.33.03.56	13	Kepala Bagian Kesra	Keterbatasan Sumber Daya; Monitoring dan Evaluasi yang belum berjalan optimal; Penyebaran Informasi kepada masyarakat yang kurang optimal.	Meningkatnya risiko penyimpangan penggunaan bantuan yang mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran; Program Kegiatan tidak berjalan optimal.
3	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum					
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.	ROO.26.33.03.58	7	Kepala Bagian Hukum	Keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang kompeten; Koordinasi yang kurang efektif dengan instansi terkait.	Proses legislasi dan regulasi menjadi tertunda; Kredibilitas pemerintah daerah dapat menurun.

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
4	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah					
	Terjadinya keterlambatan, ketidaktepatan, atau ketidakefektifan fasilitas kerja sama dalam negeri.	ROO.26.33.03.61	7	Kepala Bagian Pemerintahan	Keterlambatan dalam penyampaian data dukung	Kinerja ASN kurang
C	Program Perekonomian dan Pembangunan					
1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					
	Terjadinya ketidaktepatan, keterlambatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.	ROO.26.33.03.63	11	Kepala Bagian Perekonomian	Belum dipahaminya regulasi terkait penatausahaan keuangan bagi BLUD di Kabupaten	Regulasi baru terkait penatausahaan keuangan belum dipakai
2	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					
	Nihil					
3	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.	ROO.26.33.03.70	11	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Jadwal monitoring belum terkoordinasi dengan baik; Keterbatasan sumber daya (manusia dan peralatan); Kurang koordinasi antara pelaksana, pengawas, dan stakeholder.	Tertundanya identifikasi permasalahan di lapangan; Meningkatnya risiko penyimpangan yang tidak terdeteksi; Tumpang tindih tugas monitoring.
4	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
	Proses pengadaan barang/jasa pemerintah di OPD belum optimal	ROO.26.33.03.72	11	Kepala Bagian PBJ	Pelaku pengadaan di OPD belum memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan baik	Proses pengadaan barang/jasa pada perencanaan dan persiapan terhambat dan terlambat dari jadwal RUP
	Adanya Tender gagal	ROO.26.33.03.73	8	Kepala Bagian PBJ	Tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan atau tidak ada yang memasukkan penawaran	Tender ulang/batal
	Dokumen persiapan pengadaan tidak lengkap	ROO.26.33.03.74	10	Kepala Bagian PBJ	PPK kurang memahami persyaratan dokumen yang harus dilengkapi saat mengajukan tender ke Bagian PBJ	Dokumen persiapan pengadaan dikembalikan ke PPK
	Proses pemilihan penyedia melebihi waktu yang ditetapkan	ROO.26.33.03.75	14	Kepala Bagian PBJ	Kurang cermatnya pokja pemilihan atau pejabat pengadaan menyusun jadwal pemilihan atau kelalaian dalam melaksanakan pemilihan sesuai jadwal	Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai jadwal

Sukoharjo, Desember 2025
Sekretaris Daerah


Abdul Haris Widodo

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
 Tahun Penilaian : 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis OPD						
	Nihil						
II Risiko Operasional OPD							
A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1 Kegiatan Penataan organisasi							
	Pengisian realisasi rencana aksi RB tidak tepat waktu	ROO.26.33.03.03	Adanya surat tugas atau penunjukan personil khusus di setiap unit kerja yang bertanggung jawab menginput data ke aplikasi (seperti portal RB Nasional), Pimpinan instansi mengeluarkan instruksi atau surat pemberitahuan mengenai jadwal periode pengisian, Adanya saluran komunikasi (seperti WhatsApp Group) antara sekretariat RB dengan para PIC unit kerja untuk mengingatkan (reminder), Penggunaan sistem aplikasi internal atau nasional yang membatasi waktu input (sistem kunci otomatis setelah tenggat waktu).	Pengisian sering dilakukan di detik-detik terakhir (last minute), sehingga dokumen pendukung yang diunggah seringkali tidak relevan atau kurang lengkap.	Membuat jadwal detil yang mencakup batas waktu internal, Mengadakan sesi asistensi bersama tim sekretariat untuk memverifikasi kualitas bukti dukung sebelum diunggah, Membangun atau menggunakan lembar kendali (seperti shared spreadsheet) yang bisa dilihat pimpinan secara real-time untuk memantau unit mana yang belum mengisi.	Bagian Organisasi	Triwulan III 2026
2 Kegiatan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan							
	Fasilitasi keprotokolian tidak berjalan secara optimal	ROO.26.33.03.06	Pelaksanaan tugas keprotokolian dilakukan berdasarkan agenda pimpinan yang sudah ditetapkan; Koordinasi teknis keprotokolian biasanya dilakukan secara lisan dan situasional menjelang kegiatan.	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan secara konsisten.	Penyusunan pedoman kerja keprotokolian yang lebih jelas sebagai acuan pelaksanaan tugas di lapangan; Perjadwalan dan pembagian tugas petugas protokol yang lebih terencana untuk menghindari tumpang tindih.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Triwulan III 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Fasilitasi komunikasi pimpinan/branding media massa kurang optimal.	ROO.26.33.03.07	Penyampaian informasi kegiatan dan kebijakan pimpinan kepada media massa melalui rilis berita dan dokumentasi kegiatan; Koordinasi antara pimpinan, protokol, dan pengelola kehumasan dalam peliputan kegiatan tertentu; Pemanfaatan media sosial resmi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Penyusunan rencana komunikasi pimpinan yang lebih terarah dan berkelanjutan, termasuk penentuan isu prioritas dan pesan utama; Penjadwalan dan penguatan hubungan kerja dengan media massa agar pemberitaan lebih konsisten dan seimbang; Peningkatan kualitas konten dan waktu penyampaian informasi agar selaras dengan momentum kegiatan pimpinan.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Triwulan III 2026
3 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	ROO.26.33.03.09	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah telah mengacu pada jadwal perencanaan daerah yang ditetapkan; Perkumpulan usulan program dan kegiatan dilakukan dari unit kerja sebagai bahan penyusunan dokumen.	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Penegasan jadwal internal penyusunan dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah; Pengendalian progres penyusunan dokumen secara periodik sebelum batas waktu penyampaian; Pengecekan substansi dokumen untuk memastikan kesesuaian dengan arah kebijakan daerah.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Terjadinya keterlambatan pelaksanaan atau ketidaktepatan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	ROO.26.33.03.14	Evaluasi kinerja perangkat daerah telah direncanakan sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja; Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan dari unit kerja sebagai bahan evaluasi; Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja perangkat daerah.	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Penetapan jadwal evaluasi kinerja yang lebih pasti dan dipatuhi oleh seluruh perangkat daerah; Penguatan validasi data kinerja sebelum dilakukan evaluasi; Penegasan tindak lanjut hasil evaluasi agar benar-benar digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
4 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Terjadinya kesalahan atau keterlambatan penatausahaan serta pengujian/verifikasi keuangan SKPD.	ROO.26.33.03.16	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan sesuai ketentuan; Dokumen keuangan diperiksa sebelum dilakukan pengujian dan verifikasi; Koordinasi dilakukan dengan unit terkait apabila terdapat kekurangan dokumen.	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan secara konsisten.	Penegasan tahapan penatausahaan dan verifikasi keuangan yang harus dipenuhi sebelum proses berikutnya; Pemeriksaan berjenjang atas dokumen keuangan untuk mengurangi kesalahan berulang.	Bagian Umum	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
5 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	ROO.26.33.03.20	Pengadaan pakaian dinas dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku; Spesifikasi pakaian dan atribut ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan pengadaan.	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Penetapan jadwal pengadaan yang lebih awal agar tidak berbenturan dengan kebutuhan operasional; Pengendalian kesesuaian spesifikasi dan jumlah pakaian dinas sebelum proses pengadaan dilaksanakan; Koordinasi lebih awal dengan penyedia untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Tidak terpenuhinya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	ROO.26.33.03.23	Pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Pemetaan kebutuhan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi jabatan; Penetapan prioritas peserta diklat sesuai kebutuhan organisasi; Pemantauan realisasi pelaksanaan diklat agar sesuai rencana.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Belum optimalnya sasaran sosialisasi kepada masyarakat terutama penjual dan pembeli Rokok ilegal (tidak berpita Cukai resmi)	ROO.26.33.03.24	Sosialisasi terkait rokok ilegal telah dilakukan melalui kegiatan tertentu kepada masyarakat; Informasi disampaikan melalui media cetak dan media sosial pemerintah daerah.	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.	Penentuan sasaran sosialisasi yang lebih spesifik, terutama pelaku usaha dan konsumen rokok; Penyesuaian materi sosialisasi agar mudah dipahami dan tepat sasaran; Pelaksanaan sosialisasi secara langsung di lokasi yang berpotensi terjadi peredaran rokok ilegal; Koordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat pesan dan jangkauan sosialisasi.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Persediaan komponen intalasi listrik kurang	ROO.26.33.03.25	Persediaan komponen instalasi listrik telah dicatat dan dikelola oleh petugas terkait melalui pencatatan manual/administratif serta dilakukan pengadaan sesuai kebutuhan kegiatan.	Pengendalian persediaan belum optimal karena belum adanya pemantauan stok secara berkala, sehingga persediaan komponen instalasi listrik sering tidak mencukupi saat dibutuhkan.	Melakukan pengecekan dan pembaruan data persediaan secara rutin, menetapkan stok minimum komponen instalasi listrik, serta merencanakan pengadaan lebih awal untuk mencegah kekurangan persediaan.	Bagian Umum	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan peralatan rumah tangga.	ROO.26.33.03.27	Penyediaan peralatan rumah tangga telah direncanakan melalui usulan kebutuhan dan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Proses perencanaan dan pengadaan belum sepenuhnya mempertimbangkan waktu kebutuhan dan spesifikasi barang, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan atau ketidaksesuaian peralatan.	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan, melakukan koordinasi lebih awal dengan pihak terkait, serta memastikan kesesuaian spesifikasi sebelum proses pengadaan dilaksanakan.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Kekurangan persediaan Bahan logistik kantor	ROO.26.33.03.28	Pengelolaan persediaan bahan logistik kantor telah dilakukan melalui pencatatan penggunaan dan pengadaan sesuai kebutuhan operasional.	Pengendalian persediaan belum optimal karena belum adanya pemantauan stok secara berkala dan penetapan batas minimum persediaan, sehingga berpotensi terjadi kekurangan logistik.	Melakukan inventarisasi dan monitoring persediaan secara rutin, menetapkan stok minimum bahan logistik kantor, serta merencanakan pengadaan secara tepat waktu sesuai kebutuhan.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Tidak optimalnya pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah	ROO.26.33.03.31	Pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dengan melibatkan petugas penerima tamu dan fasilitas pendukung yang tersedia.	Pelayanan belum optimal karena keterbatasan sarana pendukung, kesiapan petugas, serta koordinasi yang belum maksimal dalam menghadapi kunjungan tamu.	Meningkatkan koordinasi dan kesiapan petugas, melengkapi sarana pendukung pelayanan tamu, serta melakukan evaluasi pelayanan secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Terjadinya keterlambatan, ketidakterlaksanaan, atau ketidakefektifan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	ROO.26.33.03.32	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD telah direncanakan melalui jadwal kegiatan serta pelaksanaan rapat sesuai ketentuan dan ketersediaan anggaran	Perencanaan jadwal dan koordinasi antar SKPD belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, pembatalan rapat, atau rapat yang kurang efektif.	Menyusun jadwal rapat secara lebih terencana dan terkoordinasi, memperkuat komunikasi antar SKPD, serta melakukan evaluasi pelaksanaan rapat untuk meningkatkan efektivitas hasil rapat.	Bagian Umum	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
7 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan peralatan dan mesin lainnya.	ROO.26.33.03.34	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya telah direncanakan melalui penyusunan kebutuhan dan spesifikasi teknis serta dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku.	Perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis belum sepenuhnya tepat serta pengendalian waktu pelaksanaan pengadaan belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan atau ketidaksesuaian barang.	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis, memperkuat pengawasan dan monitoring proses pengadaan, serta melakukan evaluasi hasil pengadaan agar sesuai dengan kebutuhan dan jadwal.	Bagian Umum	Triwulan II 2026	
Terjadinya keterlambatan atau ketidaksesuaian pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.35	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya telah direncanakan melalui penyusunan kebutuhan, spesifikasi teknis, serta pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis belum sepenuhnya akurat serta pengendalian waktu pelaksanaan pengadaan belum optimal, sehingga berpotensi terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian sarana dan prasarana.	Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis, memperkuat pengawasan dan monitoring pelaksanaan pengadaan, serta melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian hasil pengadaan dengan kebutuhan.	Bagian Umum	Triwulan II 2026	
Terjadinya keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidaktepatan pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.36	Pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya telah direncanakan melalui perencanaan kebutuhan, penyusunan dokumen teknis, serta pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perencanaan kebutuhan, spesifikasi, dan pengendalian waktu pelaksanaan pengadaan belum sepenuhnya optimal, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidaktepatan hasil pengadaan.	Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan dan dokumen teknis, memperkuat pengawasan dan monitoring proses pengadaan, serta melakukan evaluasi pelaksanaan secara berkala agar pengadaan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.	Bagian Umum	Triwulan II 2026	

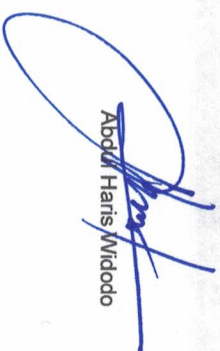
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Terjadinya gangguan, keterlambatan, atau ketidakterpenuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	ROO.26.33.03.38	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik telah dikelola melalui kerja sama dengan penyedia layanan serta penganggaran dan pembayaran rutin sesuai ketentuan.	Ketergantungan pada pihak penyedia layanan serta keterbatasan pemantauan layanan berpotensi menyebabkan gangguan, keterlambatan, atau ketidakterpenuhan kebutuhan layanan.	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan penyedia layanan, melakukan monitoring layanan secara berkala, serta menyiapkan langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap operasional.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Kendaraan dinas jabatan tidak terpelihara	ROO.26.33.03.41	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan telah diatur melalui ketentuan penggunaan dan pemeliharaan serta dialokasikan anggaran pemeliharaan secara rutin.	Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan kepatuhan pengguna kendaraan belum optimal, sehingga kondisi kendaraan dinas jabatan kurang terpelihara dengan baik.	Meningkatkan pengawasan dan penjadwalan pemeliharaan kendaraan dinas secara berkala, memperjelas tanggung jawab pengguna, serta melakukan evaluasi kondisi kendaraan untuk menjaga kelayakan operasional.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Kendaraan dinas operasional atau lapangan rusak parah	ROO.26.33.03.42	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan telah direncanakan melalui pengaturan penggunaan, perawatan rutin, serta penganggaran pemeliharaan sesuai ketentuan.	Pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan kondisi kendaraan belum optimal, sehingga kerusakan tidak terdeteksi sejak dini dan mengakibatkan kerusakan parah.	Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan secara berkala, meningkatkan pengawasan penggunaan kendaraan, serta merencanakan perbaikan atau penggantian kendaraan agar mendukung kelancaran operasional.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Peralatan Kantor banyak yang rusak	ROO.26.33.03.43	Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan kantor telah diatur melalui pencatatan aset serta penganggaran pemeliharaan sesuai ketentuan.	Pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan peralatan kantor belum optimal, sehingga kerusakan tidak tertangani sejak dini dan jumlah peralatan rusak meningkat.	Melakukan inventarisasi dan pengecekan kondisi peralatan kantor secara berkala, meningkatkan kedisiplinan penggunaan, serta merencanakan pemeliharaan atau penggantian peralatan agar mendukung kelancaran kerja.	Bagian Umum	Triwulan II 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Terjadinya keterlambatan, ketidaksiharian, atau ketidakefektifan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	ROO.26.33.03.44	Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor/bangunan lainnya telah direncanakan melalui penetapan kebutuhan, penyusunan rencana kerja, serta penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	Perencanaan teknis, pengendalian pelaksanaan, dan pengawasan hasil pekerjaan belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, ketidaksiharian, atau pemeliharaan yang kurang efektif.	Meningkatkan kualitas perencanaan teknis dan jadwal pekerjaan, memperkuat pengawasan dan monitoring pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi, serta melakukan evaluasi hasil pekerjaan secara berkala untuk memastikan efektivitas.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
	Belum terakomodirnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor secara memadai	ROO.26.33.03.45	Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor telah direncanakan melalui pengusulan kebutuhan dan penganggaran sesuai prioritas yang tersedia.	Kebutuhan pemeliharaan belum seluruhnya teridentifikasi dan terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga pemeliharaan sarana dan prasarana belum dilakukan secara memadai.	Melakukan pendataan dan penilaian kondisi sarana dan prasarana secara menyeluruh, menyusun skala prioritas pemeliharaan, serta mengusulkan penganggaran secara lebih tepat dan berkelanjutan.	Bagian Umum	Triwulan II 2026
B Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat							
1 Kegiatan Administrasi tata pemerintahan							
	Terjadinya ketidakefektifan atau keterlambatan fasilitas pelaksanaan otonomi daerah.	ROO.26.33.03.54	Dilakukan Rapat Persiapan, Bimtek Penyusunan Laporan dan dibuatkan surat edaran penyusunan laporan	Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan penyusunan laporan dilaksanakan sesuai peraturan yg berlaku	Monitoring bersama tim dari tingkat lebih atas yaitu provinsi atau pusat	Bagian Pemerintahan	Triwulan II 2026
2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan serta pengukuran capaian kinerja kesejahteraan sosial.	ROO.26.33.03.56	Diaksanakan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan, Diaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat, Diaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke beberapa titik sasaran.	Pengendalian sudah ada namun belum dapat berjalan secara optimal ke seluruh penerima bantuan	Monitoring dan evaluasi bersama pemangku kepentingan dan menambah jumlah titik sasaran kunjungan lapangan	Bagian Kesra	Tahun 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
3 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.	ROO.26.33.03.58	Tersedianya aplikasi fasilitasi penyusunan produk hukum daerah (E-Koreksi); Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan Propermperda atau Propermperkada; Rapat Koordinasi dengan perangkat daerah pengusul untuk menyamakan persepsi terhadap substansi, dasar hukum, dan urgensi produk hukum yang akan disusun.	Pengendalian sudah ada namun belum mampu menangani keterlambatan atau ketidaktepatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Penyusunan target waktu (timeline) fasilitasi penyusunan produk hukum yang disepakati bersama OPD pengusul; Monitoring dan evaluasi proses fasilitasi penyusunan produk hukum, termasuk pencatatan tahapan dan kendala yang dihadapi selama proses berlangsung.	Bagian Hukum	Triwulan III 2026
4 Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah							
	Terjadinya keterlambatan, ketidaktepatan, atau ketidakefektifan fasilitasi kerja sama dalam negeri.	ROO.26.33.03.61	Diaksanakan Rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengendalian sudah ada namun kadang kalah cepat dengan dinamisasi perkembangan masyarakat	Monitoring kegiatan bersama pemangku kegiatan terkait	Bagian Pemerintahan	Triwulan IV 2026
C Program Perencanaan dan Pembangunan							
1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan							
	Terjadinya ketidaktepatan, keterlambatan, atau ketidakefektifan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.	ROO.26.33.03.63	Adanya Regulasi Sektoral, Pembentukan Tim Pembina, Pelaporan Perodik, dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi secara rutin	Adanya Asimetri Informasi, Analisis yang Dangkal, Komunikasi Silo, dan Kapasitas SDM Pengawas kurang memadai	Pembentukan Penyusunan Key Performance Indicators (KPI) Terpadu, Agenda Sinkronisasi Terjadwal, dan Peningkatan Kompetensi Analis	Bagian Perencanaan	Triwulan IV 2026
2 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							
	Nihil						
3 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							
	Terjadinya keterlambatan atau ketidaktepatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.	ROO.26.33.03.70	Sudah tersedianya aplikasi SIEMON BANGUN dalam rangka digitalisasi sistem monitoring dan evaluasi pembangunan; Diadakan Rapat Koordinasi POK per triwulan dengan seluruh Perangkat Daerah; Diadakan Kunjungan lapangan dalam rangka movev fisik pembangunan.	Kunjungan ke lapangan dalam rangka movev fisik pembangunan belum dilakukan secara masif dan berkelanjutan	Penyusunan jadwal kunjungan ke lapangan dalam rangka movev fisik pembangunan secara berkelanjutan.	Bagian Administrasi Pembangunan	Triwulan II Tahun 2026
4 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
	Proses pengadaan barang/jasa pemerintah di OPD belum optimal		Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi proses pengadaan barang/jasa; Memberikan bimbingan teknis, konsultasi dan pendampingan proses PBJ kepada Pelaku pengadaan barang/jasa di OPD	Pengendalian sudah dilaksanakan, namun proses PBJ di OPD belum optimal.	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dan berkala.	Bagian PBJ	Triwulan III 2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Adanya Tender gagal		Melakukan Tender ulang/membatalkan Tender	Sudah dilaksanakan pengendalian namun belum optimal	Menyusun jadwal pelaksanaan tender	Bagian PBU	Triwulan I 2026
	Dokumen persiapan pengadaan tidak lengkap		Melakukan koordinasi dengan PPK dalam kegiatan review dokumen perencanaan	Pengendalian sudah dilaksanakan, namun masih terjadi ketidaklengkapan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa.	Melakukan koordinasi dengan PPK agar dokumen persiapan pengadaan segera dikirim Ke Bagian PBU sehingga dapat dilakukan tender.	Bagian PBU	Triwulan III 2026
	Proses pemilihan penyedia melebihi waktu yang ditetapkan		Monitoring jadwal pemilihan penyedia	Pelaksanaan pengendalian belum memadai.	Monitoring jadwal pemilihan secara rinci pada setiap tahapan yang harus dilalui	Bagian PBU	Triwulan III 2026

Sukoharjo, Desember 2025
 Sekretaris Daerah


 Abdol Haris Widodo